

**PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* DAN
KOMITE AUDIT TERHADAP *FRAUD* PADA BANK UMUM
SYARIAH NON DEvisa TAHUN 2015-2020**

SKRIPSI



Oleh:

**ULFA AYUK NINGSIH
NIM 210817155**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

Abstrak

Ningsih, Ulfa Ayuk. Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan Komite Audit terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah Non Devisa Tahun 2015-2020. *Skripsi*. 2023. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Maulida Nurhidayati, M.Si.

Kata Kunci: *Fraud*, *Islamic Corporate Governance* dan Komite Audit.

Fraud merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat menguntungkan diri sendiri, kelompok atau pihak lain. *Fraud* pada Bank Umum Syariah Non Devisa mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan kecurangan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aset, penipuan, pembobolan informasi data dan korupsi. Mayoritas Bank Umum Syariah Non Devisa telah melakukan penerapan *Islamic Corporate Governance* dengan peringkat 1-3. Bank Umum Syariah Non Devisa juga telah membentuk komite audit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Namun, pada kenyataannya komponen tersebut tidak sejalan dengan teori, dimana masih banyak kasus *fraud* yang terjadi pada Bank Umum Syariah Non Devisa.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan komite audit terhadap *fraud* Bank Umum Syariah Non Devisa Tahun 2015-2020. Sampel penelitian ini adalah 6 Bank Umum Syariah Non Devisa dengan 36 unit data yang diambil berdasarkan teknik *purposive sampling*. Model regresi logistik ordinal dipilih sebagai teknik analisis dan menggunakan *software* SPSS 16.0 sebagai alat bantu analisis. *Fraud* yang ditetapkan sebagai variabel dependen, sedangkan *islamic corporate governance* dan komite audit ditetapkan sebagai variabel independen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Sedangkan komite audit berpengaruh terhadap *fraud*. *Islamic Corporate Governance* dan komite audit secara simultan berpengaruh terhadap *fraud* dan mampu menjelaskan variasi *fraud* sebesar 29%, sedangkan sisanya 71% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II: Jl. Puspita Jaya, Desa Pintu, Jenangan, Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

| No. | Nama | NIM | Jurusan | Judul Skripsi |
|-----|----------------------|-----------|----------------------|---|
| 1. | Ulfa Ayuk Ningsih | 210817155 | Perbankan Syariah | Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> dan Komite Audit terhadap <i>Fraud</i> pada Bank Umum Syariah Non Devisa Tahun 2015-2020 |

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 14 Februari 2023

Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Menyetujui
Pembimbing



Muhtadin Amri, M.S.Ak.
NIP.198907102018011001

Maulida Nurhidayati, M.Si.
NIP.19891022201812001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Puspita Jaya, Jenangan, Ponorogo Telp. (0352) 3576565, Kode Pos 63492
Email: febi@iainponorogo.ac.id Website: http://febi.iainponorogo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan Komite Audit Terhadap
Fraud Pada Bank Umum Syariah Non Devisa Tahun 2015-2020
Nama : Ulfa Ayuk Ningsih
NIM : 201817155
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang
Dr. Hj. Ely Masykuroh, M.Si :
NIP. 197202111999032003 (.....)

Penguji I
Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag, M.E.I :
NIP. 197801122006041002 (.....)

Penguji II
Maulida Nurhidayati, M.Si :
NIP. 198910222018012001 (.....)

Ponorogo, Jum'at, 17 Maret 2023
Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ulfa Ayuk Ningsih
NIM : 210817155
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan Komite Audit terhadap *Fraud* Pada Bank Umum Syariah Non Devisa Tahun 2015-2020

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di website ethesis.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan dalam naskah tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 17 Maret 2023

Pembuat pernyataan



Ulfa Ayuk Ningsih

210817155

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ulfa Ayuk Ningsih

NIM : 210817155

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* DAN KOMITE AUDIT
TERHADAP *FRAUD* PADA BANK UMUM SYARIAH NON DEVISA
TAHUN 2015-2020

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 14 Februari 2023

Pembuat Pernyataan



Ulfa Ayuk Ningsih
NIM 210817155

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, perkembangan bank syariah bermula pada berdirinya koperasi Ridho Gusti dan Baitul Tamwil Salman di Bandung pada tahun 1980. Sementara Bank Islam pertama kali di Indonesia yakni Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1992. Dimana dengan di latarbelakangi krisis ekonomi dan moneter tahun 1998 serta keluarnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.¹ Dalam undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Bank Syariah di Indonesia terdiri dari 2 bank, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Bank Umum Syariah Devisa dan Bank Umum Syariah Non Devisa. Bank Non Devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa. Misalnya

¹Andrianto & Anang Firmansyah, *Maajemen Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktik*, (Surabaya: Qiara Andrianto Media, 2019), 12.

²Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 13.

dalam tranfer ke luar negeri, inkaso keluar negeri, *travelers, cheque*, pembukaan dan pembayaran *letter of credit*.³

Berkembangnya Bank Syariah Non Devisa di Indonesia dalam mempertahankan nama baik dan citra di mata masyarakat agar tetap menjaga kepercayaan, maka tantangan yang dihadapi oleh perbankan semakin besar. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 58, yang artinya ‘‘*Sungguh, Allah menyuruh mu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*,’’⁴ Dimana ayat ini memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak, sehingga islam sangat menolak semua tindakan kecurangan (*fraud*) yang dapat mengakibatkan kerugian pihak lain. Kecurangan atau *fraud* didefinisikan sebagai kegiatan penipuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang salah dan merugikan orang lain.⁵ Hal yang menjadi pertanyaan apakah Bank Umum Syariah Non Devisa yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah akan menjamin terlepas dari tindakan kecurangan. Namun, pada kenyataannya masih ada yang melakukan tindakan kecurangan, terbukti tindakan kecurangan yang terjadi melibatkan pihak internal Bank Umum Syariah Non Devisa. Salah satunya Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) Syariah yang masih terlilit kasus dugaan kredit fiktif dengan

³Nani Hartati, ‘‘Analisis Komporasi Kinerja Keuangan; Bank Devisa dan Bank Non Devisa,’’ *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Volume 6, Nomor 2, (2017), 37.

⁴Abdul Halim, ‘‘Karakteristik Pemegang Amanah dalam Al-Qur’an,’’ *Jurnal Studi al-Qur’an dan Hadis*, Volume 11, Nomor 2, (2019), 191.

⁵Salma Sabila & Puspita, ‘‘Analisis Pengaruh *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap jumlah *Fraud* Bank Umum Syariah periode 2015-2019,’’ *Paradigma*, Volume 19, Nomor 1, (2022), 12.

merugikan pihak bank senilai Rp. 548 miliar. Pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut adalah Direktur Utama dan pegawai Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) Syariah yang masih tidak menaati prosedur saat memberikan kredit dengan mengagunkan tanah induk dan bangunan ke bank lain.⁶

Kasus tersebut, membuktikan bahwa perbankan syariah tidak menjamin bebas dari tindakan kecurangan. Hal ini menunjukkan Bank Umum Syariah Non Devisa dalam melakukan kegiatan operasional belum sepenuhnya melaksanakan kepatuhan syariah. Kecurangan yang dilakukan tersebut mengakibatkan kerugian pada bank maupun pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009, tentang *fraud*, mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan penyimpangan yang sengaja dilakukan untuk menipu, mengelabui, dan memanipulasi bank, nasabah, atau orang lain, yang terjadi pada lingkungan bank, sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau orang lain mengalami kerugian serta pelaku *fraud* mendapat keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁷

Selain itu, terbukti juga pada laporan tahunan yang ditemukan tindakan kasus kecurangan dengan melibatkan pihak internal bank, direksi, dan karyawan. Dimana ditunjukkan pada Tabel 1.1 dengan jumlah 6 Bank Umum

⁶<https://kap-ses.com/web/kasus-kredit-fiktif-dua-pejabat-bank-bjb-syariah/>(diakses pada 19 November 2022, jam 09.15).

⁷Bank Indonesia, “Surat Edaran Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang *Fraud*”

Syariah Non Devisa memiliki kasus kecurangan selama 6 (empat) tahun yaitu, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah *Fraud* Bank Umum Non Devisa Syariah Tahun 2015 – 2020

| No. | Bank Umum Syariah Non Devisa | Tahun | | | | | | Jumlah |
|-----|------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | Bank BRI Syariah | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 7 | 31 |
| 2 | Bank BCA Syariah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Bank Syariah Bukopin | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | Bank Panin Syariah | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 5 | Bank Victoria Syariah | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | Bank BJB Syariah | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 22 |
| | Jumlah | 6 | 10 | 17 | 13 | 20 | 11 | 77 |

Sumber: Annual Report Masing-Masing Bank Umum Syariah Non Devisa

Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah kasus *fraud* Bank Umum Syariah Non Devisa tahun 2015-2020 tertinggi pertama diduduki oleh Bank BRI Syariah dengan jumlah sebanyak 31 kasus *fraud*. Kasus *fraud* tertinggi kedua diduduki oleh Bank BJB Syariah dengan jumlah sebanyak 22 kasus *fraud*. Kemudian pada Bank Umum Syariah Non Devisa lainnya, selain Bank BRI Syariah dan Bank BJB Syariah berada pada rentang kasus *fraud* tidak tertinggi. Tabel 1.1 juga menunjukkan jumlah kasus *fraud* dari tahun 2015 hingga 2020 mengalami naik turun. Dimana dapat dilihat pada tahun 2015 sampai 2017 jumlah kasus *fraud* mengalami kenaikan sebesar 17 kasus *fraud*. Pada tahun 2018 jumlah kasus *fraud* mengalami penurunan sebesar 13 kasus *fraud*. Pada tahun 2019 jumlah kasus *fraud* mengalami kenaikan sebesar 20 kasus *fraud*. Pada tahun 2020 jumlah kasus *fraud* mengalami penurunan sebesar 11 kasus *fraud*. Dari penjelasan tersebut selama tahun 2015–2020 Bank Umum Syariah Non Devisa masih menghadapi kejadian kasus *fraud*. Sehingga dapat

disimpulkan Bahwa Bank Umum Syariah Non Devisa yang menjalankan kegiatannya sudah menerapkan berdasarkan prinsip syariah, tidak menjamin bahwa bank tersebut dapat bebas dari kasus tindakan *fraud* (kecurangan).

Secara teoritis, penyebab seseorang melakukan *fraud*, pertama kali dikembangkan oleh Donald Cressey dengan teorinya yang dikenal dengan *fraud triangle*, yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan) dan *rationalization* (pembenaran).⁸ Volker dalam Asrori mengungkapkan dua isu penting terkait kelemahan tata kelola perusahaan perbankan syariah salah satunya menyangkut *sharia compliance*, dimana manajemen bank syariah tidak mampu memberikan jaminan kepatuhan syariah pada setiap layanan prosuk dan jasa perbankan yang diberikan. Agar dapat memenuhi penyediaan informasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Hameed merekomendasikan *Islamic Disclosure Index* (IDI) yang dikembangkan berlandaskan 3 komponen indikator pengungkapan islami, yaitu *shariah compliance*, *corporate governance* dan *social/environment disclosure*.⁹ Sedangkan menurut Rezaee yang dikutip dalam Rozmita Dewi YR menyebutkan bahwa faktor yang mendorong terjadinya *fraud* meliputi peranan komite yang tidak efektif, tidak menguasai ilmu pengetahuan, tidak

⁸Eko Sudarmanto, "Manajmen Resiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan *Fraud*," *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 9, Nomor 2, (2020), 108.

⁹Haifa Najib, "Pengaruh *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap *Fraud* Pada Bank Syariah." *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 4-5

menjalankan *Islamic Corporate Governance* sesuai prinsip islam, pergantian auditor eksternal sering terjadi, fungsi audit internal kurang efektif.¹⁰

Dalam kegiatan pengelolaan keuangan syariah yang mempunyai karakter khusus, dan juga memiliki resiko tinggi, sehingga para pelakunya membutuhkan prinsip kehati-hatian, dengan aspek kepatuhan syariah (*shariah compliance*) sebagai upaya pencegahan kemungkinan terjadinya kasus kecurangan (*fraud*).¹¹ Munculnya isu-isu tentang kelemahan tata kelola (*corporate governance*) perbankan syariah yang semakin menarik perhatian para pakar ekonomi dan keuangan Islam. Menurut *Cadbury Committee corporate governance* didefinisikan sebagai sistem yang mengontrol dan mengarahkan bank syariah baik secara eksternal atau internal yang bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan semua *stakeholder*.¹²

Islamic Corporate Government dalam peraturan Bank Indonesia merupakan tata kelola bank yang menerapkan prinsip (*transparency*) keterbukaan, (*accountability*) akuntabilitas, (*responsibility*) pertanggung jawaban dan (*professional*) profesional serta (*fairness*) kewajaran).¹³

Berdasarkan data Tahun 2015-2020 telah ditemukan peringkat penerapan *Islamic Corporate Government* yang dilaporkan oleh masing-masing Bank

¹⁰Rozmita Dewi YR, *Penyebab dan Pencegahannya* (Bandung: Alfabeta, 2017), 7-8.

¹¹Atik Emilia Sula and Moh Nizarul Alim, "Pengawasan, Strategi Anti *Fraud*, dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya *Fraud Preventive* Pada Lembaga Keuangan Syariah," *JAFFA* Volume 2, Nomor 2, (2014), 92.

¹²Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Rajawali Pres, 2015), 40.

¹³Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance*"

Umum Syariah Non Devisa dengan peringkat 1 sampai 3. Dimana peringkat 1 mencerminkan bahwa manajemen bank sudah menerapkan *Islamic Corporate Government* yang secara umum sangat baik. Peringkat 2 mencerminkan bahwa manajemen bank sudah menerapkan *Islamic Corporate Government* yang secara umum baik. Serta peringkat 3 mencerminkann bahwa manajemen bank sudah menerapkan *Islamic Corporate Government* yang secara umum cukup baik. Tabel 1.2 memberikan gambaran data nilai penerapan *Islamic Corporate Government* pada Bank Umum Syariah Tahun Non Devisa

Tabel 1.2
Data Islamic Corporate Government Bank Umum Syariah Non Devisa
Tahun 2015-2020

| No. | Bank Umum Syariah Non Devisa | Tahun | | | | | |
|-----|------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Bank BRI Syariah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Bank BCA Syariah | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Bank Syariah Bukopin | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Bank Panin Syariah | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | Bank Victoria Syariah | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Bank BJB Syariah | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Sumber: Annual Report Masing-Masing Bank Umum Syariah Non Devisa

Berdasarkan Tabel 1.2 pada masing-masing Bank Umum Syariah Non Devisa sudah melakukan penilaian mandiri atas penerapan *Islamic Corporate Government*. Dimana data tersebut dari tahun 2015 sampai tahun 2020 rentang peringkat 1-3. Jika dibandingkan antara nilai peringkat penerapan *Islamic Corporate Government* yang ditunjukkan pada Tabel 1.2 dengan keterjadinya kasus *fraud* pada Tabel 1.1, terlihat bahwa Bank BCA Syariah pada tahun 2015-2020 memiliki peringkat 1 (penerapan *Islamic Corporate Governance* secara umum sangat baik), dengan kepemilikan total sebanyak 1 kasus *fraud*.

Selanjutnya Bank BRI Syariah pada tahun 2015-2020 secara berturut-turut memiliki peringkat 2 (penerapan *Islamic Corporate Governance* secara umum baik), namun tidak bisa terlepas dari kasus kejadian *fraud* dengan kepemilikan total sebanyak 31 kasus *fraud*. Begitupun juga Bank BJB Syariah pada tahun 2015-2020 secara berturut-turut memiliki peringkat 3 (penerapan *Islamic Corporate Governance* secara umum cukup baik), namun tidak bisa terlepas dari kasus kejadian *fraud* dengan kepemilikan total sebanyak 22 kasus *fraud*.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, meskipun hasil penilaian penerapan *Islamic Corporate Governance* pada oleh masing-masing Bank Umum Syariah Non Devisa yang berada peringkat 1 sampai 3, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi kekurangan dalam penerapan *Islamic Corporate Governance*. Namun, kecilnya peringkat penerapan *Islamic Corporate Governance* tersebut tidak sejalan dengan fakta, yang mana masih ada banyak terjadi kasus *fraud* selama tahun 2015 hingga 2020. Penelitian yang dilakukan oleh Mifthahul Ridha dan Umiyati dengan hasil kesimpulan variabel bahwa *Islamic Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *fraud*. Artinya, kehadiran dan penggunaan tata kelola perusahaan belum bisa memperkecil tingkat kecurangan di bank syariah.¹⁴

Dalam Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, menjelaskan bahwa komite audit sebagai komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan

¹⁴Mifthahul Ridha & Umiyati, “*Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance dan Non Performing Financing terhadap Pengungkapan Fraud Bank Umum Syariah,*” *Jurnal Akuntansi dan Governance* Volume 3, Nomor 1, (2022), 12.

bertanggung jawab untuk membantu melakukan tugas dan fungsinya.¹⁵ Menurut Wiliams dan Menon dalam Rusdiyanto dkk, menyebutkan bahwa semakin banyak komite audit dari direksi independen, maka akan semakin efektif untuk mencegah kecurangan (*fraud*). Serta menurut Dechow dkk dan Beasley, juga menyebutkan bahwa perbankan syariah yang memiliki anggota independen sedikit diantara komite audit, maka akan menunjukkan terjadinya kecurangan (*fraud*) yang tinggi.¹⁶

Berdasarkan data yang diperoleh komite audit yang dimiliki pada Bank Umum Syariah Non Devisa selama 2015-2020 ditunjukkan pada Tabel 1.3. Dimana Tabel 1.3 menunjukkan gambaran data presentase komite audit yang berasal dari pihak independen terhadap jumlah anggota komite audit secara keseluruhan pada Bank Umum Syariah Non Devisa.

Tabel 1.3
Data Komite Audit Bank Umum Syariah Non Devisa Tahun 2015-2020(%)

| No | Bank Umum Syariah Non Devisa | Tahun | | | | | | Rata-rata |
|----|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | Bank BRI Syariah | 60,00 | 60,00 | 42,86 | 42,86 | 60,00 | 40,00 | 50,95 |
| 2 | Bank BCA Syariah | 66,67 | 66,67 | 40,00 | 66,67 | 50,00 | 25,00 | 52,50 |
| 3 | Bank Bukopin Syariah | 50,00 | 66,67 | 50,00 | 66,67 | 66,67 | 33,33 | 55,55 |
| 4 | Bank Panin Syariah | 33,33 | 33,33 | 66,67 | 33,33 | 33,33 | 16,67 | 36,11 |
| 5 | Bank Victoria Syariah | 66,67 | 33,33 | 33,33 | 50,00 | 50,00 | 33,33 | 44,44 |
| 6 | Bank BJB Syariah | 60,00 | 50,00 | 25,00 | 25,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |

Sumber: Annual Report Masing-Masing Bank Umum Syariah Non Devisa

Dalam teori Menon dan Wiliams yang dikutip Rusdiyanto dkk, semakin banyak anggota komite audit yang berasal dari pihak independen

¹⁵Rusdiyanto, Susetyorini, dan Umi Elan, *Good Corporate Governance: Teori dan Implementasinya di Indonesia* (Bandung: Refika Adhitama, 2019), 214.

¹⁶Ibid., 214.

maka tidak akan menjamin keterjadian kasus *fraud* lebih sedikit.¹⁷ Namun faktanya pada data Tabel 1.3 menunjukkan bahwa Bank Panin Syariah memiliki rata-rata komite audit paling sedikit, namun pada kenyataannya memiliki jumlah kasus *fraud* sebanyak 11 kasus. Sedangkan Bank BJB Syariah yang memiliki rata-rata komite audit lebih besar dari Bank Panin Syariah, juga memiliki jumlah kasus *fraud* lebih tinggi yakni 22 kasus. Begitupun juga dengan Bank Victoria Syariah yang memiliki komite audit yang lebih banyak dari Bank BJB Syariah dan Bank Panin Syariah juga tidak mampu terlepas dari terjadinya kasus *fraud* yakni sebanyak 6 kasus.

Penelitian yang dilakukan oleh Monika Budiman, dimana variabel komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Hal ini, dapat membuktikan bahwa pentingnya komite audit untuk mencegah terjadinya kasus kecurangan (*fraud*). Yang mana dengan kehadiran komite audit dalam bank sebagai pengawas maka dapat meminimalisir tingka kecurangan (*fraud*).¹⁸

Jika kejadian *fraud* berlangsung secara terus menerus, maka akan menyebabkan hilangnya kepercayaan dan loyalitas nasabah maupun investor atau bahkan dapat mengalami kebangkrutan. Untuk menghindari hal-hal tersebut ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya *fraud*. Akan tetap tidak

¹⁷Rusdiyanto, Susetyorini & Umi Elan, *Good Corporate Governance: Teori dan Implementasinya di Indonesia* (Bandung: Refika Adhitama, 2019), 214.

¹⁸Monika Budiman, ‘‘Pengaruh Pengendalian Internal, Audit Internal, *risk based*, Komite Audit dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan,’’ *Tesis* (Jakarta: STIE Jakarata, 2019), 238.

semua tindakan pencegahan kecurangan bisa efektif menurunkan angka *fraud* pada lembaga khususnya perbankan syariah.

Pada uraian diatas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kembali terkait *fraud*, dikarenakan ada ketidaksesuaian antara uraian teori atau peraturan dengan fakta yang ada. Dimana kelemahan dalam menerapkan tata kelola bank syariah dan komite audit dapat memberikan peluang terjadinya tindakan *fraud*. Sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul ‘Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan Komite Audit terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah Non Devisa Tahun 2015-2020’.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah *Islamic Corporate Governance* berpengaruh secara parsial terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah Non Devisa Tahun 2015-2020?
2. Apakah komite audit berpengaruh secara parsial terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah Non Devisa Tahun 2015-2020?
3. Apakah *Islamic Corporate Governance* dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap *fraud* Bank Umum Syariah Non Devisa Tahun 2015-2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah Non Devisa Tahun 2015-2020 secara parsial.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah Non Devisa Tahun 2015-2020 secara parsial.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan komite audit terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah Non Devisa Tahun 2015-2020 secara simultan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan terutama mengenai *Islamic Corporate Governance*, komite audit dan *fraud* pada Perbankan Syariah di Indonesia.

2. Manfaat secara praktis

- a) Bagi Bank Umum Syariah Non Devisa

Penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dimasa yang akan datang bagi Bank Umum Syariah Non Devisa terutama mengenai *Islamic Corporate Governance*, dan komite audit terhadap *fraud* pada Bank. Selain itu, juga dapat memberikan masukan untuk memperbaiki dan memperkuat sistem penanganan berdasarkan prinsip syariah dalam mengatasi tingkat kecurangan.

- b) Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi Bank Umum Syariah mengenai pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan komite audit terhadap *fraud* pada Bank. Selain itu, dapat digunakan sebagai acuan untuk menjalankan kegiatannya yang

berprinsip islam, dalam rangka menghindari dan meminimalisir terjadinya kecurangan pada Perbankan Syariah di Indonesia.

c) Bagi Bank Indonesia

Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang digunakan untuk bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan atau keputusan anti-*fraud* di masa yang akan datang. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai referensi tentang tata kelola dalam perbankan yang baik untuk mencegah terjadinya kecurangan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah uraian singkat tentang hal-hal yang akan ditulis peneliti secara sistematis agar mempermudah pembaca untuk dipahami. Berikut adalah sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Landasan teori, dalam bab ini menguraikan tentang hal-hal yang berisikan pengertian *fraud*, *Islamic Corporate Governance*, dan komite audit. Selain itu, bab ini terdapat kajian pustaka, kerangka berfikir dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

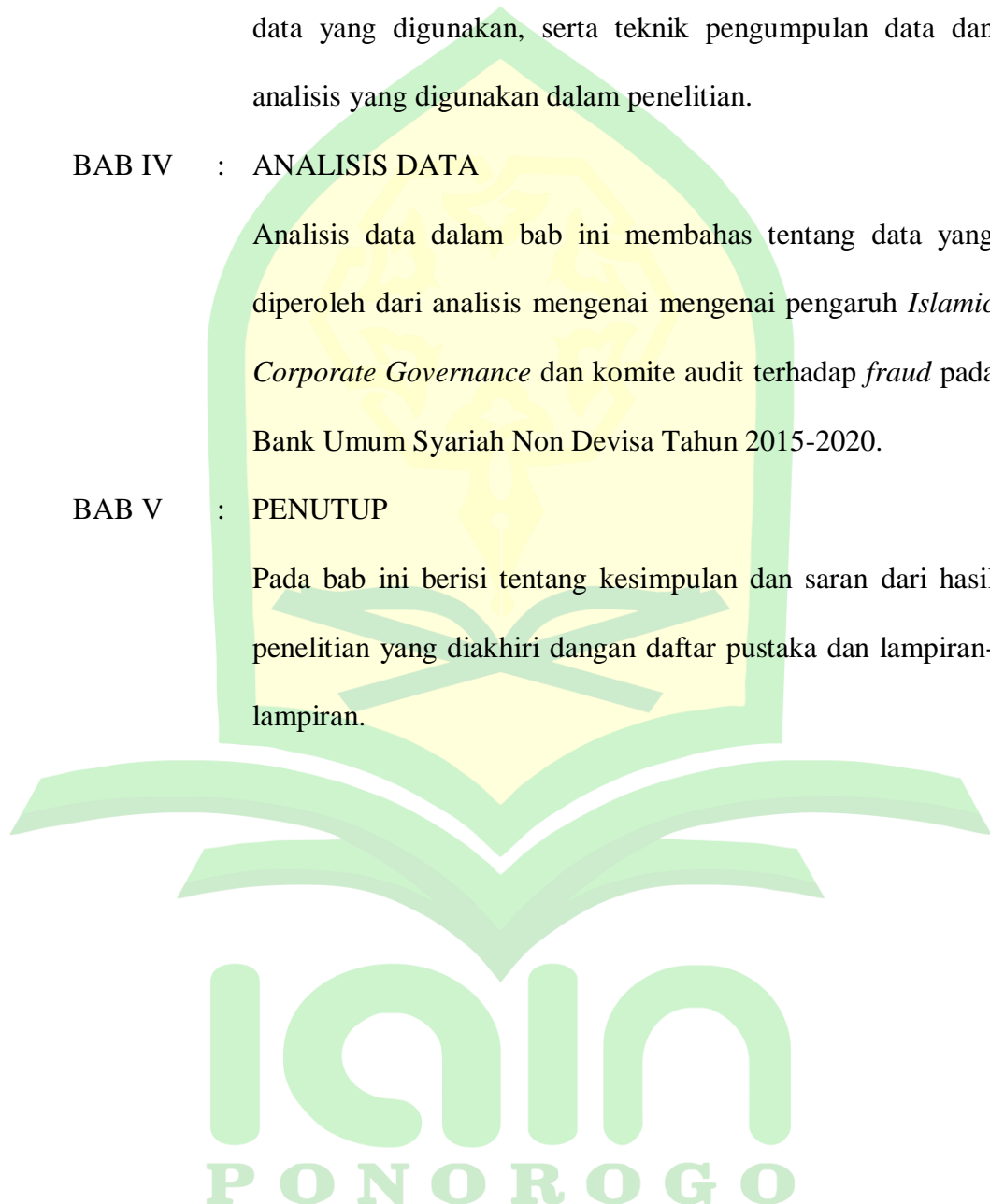
Metode penelitian dalam bab ini membahas tentang rancangan penelitian yang digunakan oleh peneliti baik lokasi dan periode penelitian, populasi, sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, serta teknik pengumpulan data dan analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : ANALISIS DATA

Analisis data dalam bab ini membahas tentang data yang diperoleh dari analisis mengenai mengenai pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan komite audit terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah Non Devisa Tahun 2015-2020.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. *Fraud*

a. Definisi *Fraud*

Subajio Tjahjono mengartikan *fraud* secara singkat mengatakan bahwa *fraud* adalah kejahatan dengan penipuan dalam hal untuk mendapatkan uang atau barang secara tidak sah.¹ Gary W. Adams mendefinisikan *fraud* sebagai usaha seseorang untuk memperkaya diri sendiri melalui penyalahgunaan atau penyimpangan yang dilakukan secara sengaja terhadap aset perusahaan dengan menggunakan kedudukan jabatan. Seseorang yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan akan dapat melakukan penyimpangan dari aset yang dikelola. Semakin berkuasa atau kedudukan yang makin tinggi semakin mudah untuk tergoda dalam melakukan penyimpangan. Dengan kekuasaan yang dimilikinya maka pelaku *fraud* memiliki kesempatan dalam memanfaatkan aset yang dikelolanya untuk disalahgunakan.²

Standar Pengauditan, faktor yang membedakan penyimpangan dan kekeliruan adalah apakah tindakan yang mendasarinya, yang berakibat

¹Kasdin Sihotang, *Etika Profesi Akuntansi Teori dan Kasus* (Depok: PT. Kanisius, 2019), 250.

²Silviana Pebruary, *Pencegahan Fraud di Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 59.

terjadinya salah saji dalam laporan keuangan, berupa tindakan yang sengaja atau tidak sengaja. Terjadinya penyimpangan suatu tindakan yang disengaja, yang tidak dapat terdeteksi oleh suatu pengauditan dapat memberikan efek yang merugikan dan cacat bagi proses pelaporan keuangan. Menurut Albert, pada setiap *fraud* memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut:

1. Pemalsuan fakta
2. Dilakukan dengan sadar dengan tujuan untuk melakukan penipuan
3. Fakta yang dipalsukan dipercaya oleh korban
4. Berakibat kerugian karena mempercayainya.³

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud*

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* atau kecurangan. Sedangkan menurut Rezaee ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya *fraud* antara lain:⁴

- 1) Kurangnya tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab
- 2) Direksi yang tidak efektif
- 3) Tidak ada atau komite audit tidak efektif
- 4) Sering terjadi pergantian auditor eksternal atau pemilihan auditor tidak berpengalaman
- 5) Ketergantungan hanya beberapa pelanggan
- 6) Investasi yang ditanamkan berlebihan dan atau kerugian

³Rozmita Dewi RY, *Fraud Penyebab dan Pencegahannya* (Bandung: Alfabeta, 2017), 2-

⁴Ibid., 11.

- 7) Membatasi perjanjian pinjaman
- 8) Ketiadaan struktur pengawasan atau pengendalian internal yang memadai dan efektif.⁵

Sedangkan menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.39/POJK/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum, menyatakan bahwa ada beberapa faktor intern bank yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya *fraud*, antara lain:

- 1) Kurangnya pelatihan, ketrampilan, dan pengetahuan atas pencegahan dan penanganan *fraud*
- 2) Budaya pemberian bonus atas pengambilan resiko secara berlebihan
- 3) Kebijakan dan prosedur yang kurang jelas, antara lain terhadap pengeluaran biaya untuk representasi, hiburan serta sumbangan amal dan politik
- 4) Pengendalian keuangan yang kurang memadai
- 5) Kurangnya arahan direksi dan dewan komisaris terkait pencegahannya dan penanganan *fraud*.⁶

Mulfrod & Comiskey memberikan tanggapan ada beberapa atribut yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya resiko terdapat *fraud* di perusahaan, diantaranya terdapat kelemahan dalam

⁵Ibid., 11.

⁶Indonesia POJK, "Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 39/POJK.03/2019 Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019)

pengendalian internal, perusahaan tidak memiliki komite audit dan terdapat hubungan kekeluargaan antara manajemen dan karyawan perusahaan. Berikut klasifikasi dari *creative accounting practices*:

- 1) Pengakuan terhadap fiktif (*recognizing premature or fictitious revenue*)
- 2) Kapitalisasi yang agresif dan kebijakan amortisasi yang terlalu lebar (*aggressive capitalization & extended amortization policies*)
- 3) Pelaporan menyesatkan atas aktiva & utang (*misreported assets and liabilities*)
- 4) Perekayasa laporan laba rugi (*creative with the income statement*)
- 5) Timbul masalah atas pelaporan arus kas (*problems with cash-flow reporting*)⁷

c. Jenis-jenis *fraud*

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengklasifikasikan *fraud* (kecurangan) dalam tiga jenis yang dikenal dengan pohon kecurangan (*the fraud tree*), yaitu:⁸

- 1) Kecurangan dalam laporan keuangan

Kecurangan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah satu material laporan yang merugikan investor dan kreditor.

⁷Ibid., 13

⁸Ahmad Fauzi, *Super Auditor Menumpas Korupsi dan Mengungkap Fraud Tidak Biasa* (Riau: Bantam Publisher, 2020), 14-19.

Misalnya pendapatan dicatat lebih besar dari sebenarnya, uang dan biaya dipajak lebih kecil dari yang sebenarnya.⁹

2) Penyalahgunaan aset

Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam “kecurangan kas” dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya”, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang.¹⁰

3) Korupsi

Menurut Wijianto dan Ridwanto korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan hal pribadi yang bisa merugikan publik yang pertentangan dengan ketentuan yang ada.¹¹ Studi dari para *Certified Fraud Examiners* (CFE) menunjukkan empat jenis utama korupsi: Konflik kepentingan (*conflicts of interest*), Penyuapan (*bribery*), gratifikasi (*illegal gratuities*) dan pemerasan ekonomi (*economic extortion*)¹²

d. Faktor pendorong terjadinya *fraud*

Secara teoritis, penyebab seseorang melakukan *fraud*, pertama kali dikembangkan oleh Donald Cressey dengan teorinya yang dikenal dengan *fraud triangle*. Dalam teorinya dijelaskan bahwa *fraud triangle* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

⁹ Ibid., 21.

¹⁰Rahima Br Purba & Haryono Umar, *Kualitas Audit & Deteksi Korupsi* (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), 82.

¹¹Silviana Pebruaryy, *Pencegahan Fraud di Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 12.

¹²Ibid., 19.

1) Tekanan (*pressure*)

Tekanan merupakan penggelapan uang perusahaan oleh pelaku yang bermula dari suatu tekanan. Orang tersebut mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak, sehingga secara personal kebutuhan individu dianggap lebih penting dari kebutuhan organisasi.¹³ Tipe fraud serta pelakunya, kebanyakan ahli yang paham tentang filosofi fraud membagi *pressure* atau tekanan penyebab fraud menjadi empat kategori yaitu:

- a) Tekanan finansial
- b) Kebiasaan buruk dari masa lalu yang terus dilakukan
- c) Tekanan yang muncul dari hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan
- d) Tekanan-tekanan dari berbagai faktor¹⁴

2) Kesempatan (*opportunity*)

Kecuranga akan dilakukan jika ada kesempatan dimana seseorang harus memiliki akses terhadap aset atau memiliki wewenang untuk mengatur prosedur pengendalian yang memperkenankan dilakukannya skema kecurangan.¹⁵ Menurut Albercht, setidaknya terdapat enam faktor utama meningkatkan peluang bagi individu untuk melakukan fraud dalam organisasi, yaitu:

¹³Eko Sudarmanto, "Manajmen Resiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan *Fraud*," *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 9, Nomor 2, (2020), 108.

¹⁴Ibid., 41.

¹⁵Ibid., 108.

- a) Lemahnya kontrol yang dapat mencegah dan /atau mendeteksi perilaku yang mengarah pada tindakan *fraud*
 - b) Ketidakmampuan menilai kualitas kinerja
 - c) Ketidakmampuan dalam memberikan efek jera pada pelaku *fraud*
 - d) Kekurangan akses terhadap informasi
 - e) Keridaktahuan, apatis dan ketidakmampuan
 - f) Kelemahan pada jeak audit.¹⁶
- 3) Pembeneran (*rationalization*)

Kecurangan yang dilakukan karena ada rasionalisasi yang dilakukan seseorang atau kelompok orang dengan membangun pembeneran atas kecurangan yang dilakukan. Pelaku *fraud* biasanya mencari alasan pembeneran bahwa yang dilakukannya bukan pencurian atau kecurangan, tetapi sesuatu yang memang merupakan haknya.¹⁷ Misalnya pelaku berfikir bahwa, perusahaan atau tempat dimana pelaku bekerja sudah berutang budi kepadanya, karena dia sudah berkontribusi dalam kelangsungan hidup perusahaan. Pelaku berfikir, ‘saya hanya pinjam, akan saya kembalikan.’¹⁸

¹⁶Ibid., 47.

¹⁷Ibid., 109.

¹⁸Ibid., 53.

2. *Islamic Corporate Governance*

a. *Definisi Islamic Corporate Governance*

Good Corporate Governance adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu *good* yang berarti baik, *corporate* yang berarti perusahaan dan *governance* yang berarti pengaturan. Secara umum istilah *Good Corporate Governance* diartikan dalam bahasa Indonesia dengan tata kelola perusahaan yang baik. Dan di dunia perbankan berarti tata kelola bank yang baik.¹⁹ Menurut Bank Dunia mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber daya perusahaan berkerja secara berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.²⁰ Menurut Najmudin *Islamic Corporate Governance* merupakan suatu sistem atau kebijakan yang mengatur dan mengendalikan jalannya suatu perusahaan yang dimana dengan cara melindungi hak-hak para stakeholder dan mengontrol proses terjadi pada suatu perusahaan untuk dapat mencapai tujuan awal perusahaan berdasarkan ketentuan-ketentuan Allah SWT.

Menurut Junusi *shariah compliance* adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Sehingga *syariah governance*

¹⁹Abdul Nasser Hasibuan, Rahmad Annam, and Nofinawati, *Audit Bank Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 69.

²⁰Efrizal Syofyan, *Good Corporate Governance (GCG)* (Malang: Unisma Press, 2021), 102.

adalah suatu sistem, peraturan, dan proses yang digunakan untuk mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan islam serta mengawasi, mengatur, dan mendorong kinerjanya secara efisien agar menghasilkan nilai tambah yang berkesinambungan bagi *stakeholders* dalam jangka panjang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Islamic Corporate Governance* pada bank syariah merupakan struktur dan mekanisme untuk mengatur setiap pengelolaan perbankan dalam menjalani kegiatannya untuk menghasilkan perekonomian yang lebih baik. Semakin baik *Islamic Corporate Governance* suatu perbankan, maka semakin baik pula perbankan tersebut. Tujuan dari *Islamic Corporate Governance* dalam perbankan syariah yaitu keadilan, kejujuran, masqad syariah dan perlindungan terhadap kebutuhan manusia.²¹

b. Indikator dan Prinsip *islamic corporate governance*

Dalam menerapkan *Islamic Corporate Governance* terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk membantu dan menjadi acuan perbankan sehingga dapat terwujudkan dalam menerapkan *Islamic Corporate Governance*. Menurut Abidin ada 6 indikator, yaitu:

1) Keterbukaan (*transparency*)

Keterbukaan mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku

²¹Sonia Ayesa Riska, “Analisis Implementasi *Islamic Corporate Governance* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Banda Aceh” *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020), 11-13.

kepentingan. Transparansi diperlukan agar pelaku bisnis syariah menjalankan bisnis secara objektif dan sehat.

2) Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya yang bertujuan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pelaku bisnis syariah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

3) Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Hubungan dengan asas *responsibility*, pelaku bisnis syariah harus mematuhi peraturan perundangan dan ketentuan bisnis syariah, serta melaksanakan tanggung-jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan pertanggungjawaban ini maka entitas bisnis syariah dapat terpelihara kesinambungannya dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai pelaku bisnis yang baik.

4) Profesional (*professional*)

Profesional yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun serta konsistensi atau sikap *istiqomah* yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko.

5) Kewajaran (*fairness*)

Kewajaran mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan. Kewajaran merupakan salah satu manifestasi adil

dalam dunia bisnis. Setiap keputusan bisnis, baik dalam skala individu maupun lembaga, hendaklah dilakukan sesuai kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan apa yang biasa berlaku, dan tidak diputuskan berdasar suka atau tidak suka.²²

6) Kepatuhan (*shariah compliance*)

Shariah compliance yaitu kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah islam dalam setiap kegiatan transaksi maupun kegiatan usahanya. Menurut Hikmah Endraswati konsep *islamic corporate governance* menggunakan prinsip berdasarkan 4 sifat Nabi Muhammad SAW. yaitu:

a) Sidiq (jujur)

Sidiq yang berarti jujur merupakan landasan utama dalam *islamic corporate governance*. Dalam menerapkan sidiq menekankan dayanya kejujuran dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalani fungsinya sehingga tidak adanya kemungkinan terjadinya penipuan, korupsi, dan lainnya, yangmana pihak internal maupun eksternal dapat memegang prinsip kejujuran.

b) Amanah (dapat dipercaya)

Amanah yang berarti dapat dipercaya, tidak ingkar janji dan bertanggung jawab. Dalam menerapkan sifat ini pihak internal

²²Fadiyah Hani Sabilah, "Karakteristik dan Penerapan *Islamic Corporate Governance* pada Perbankan Syariah," *Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Volume 2, Nomor 2, (2018), 118.

maupun eksternal akan mendapatkan keuntungan dalam setiap perjanjian atau kontrak yang dilakukan, karena tidak adanya unsur penipuan maupun hal-hal yang merugikan salah satu pihak akibat sifat yang tidak baik. Pihak eksternal juga akan merasa puas dalam menjalin kerja sama terhadap pihak internal karena adanya rasa aman sehingga dapat meningkatkan loyalitas pihak internal.

c) Tabligh (menyampaikan)

Tabligh berarti menyampaikan, yaitu menyampaikan informasi secara akurat dan benar tanpa adanya kelebihan maupun kekurangan dan adanya keterbukaan atau transparansi dalam menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

d) Fatanah (cerdas)

Fatanah yang berartikan cerdas yaitu kecerdasan yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam mempraktikkan pekerjaannya. Setiap perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara sehat dalam meningkatkan pertumbuhan perusahaannya. Dengan adanya sifat ini maka akan mendukung sifat-sifat lainnya karena dengan adanya sifat fatanah akan membangun kebijakan,

keterbukaan wawasan, mampu menyeimbangkan perubahan zaman dan mampu menghadapi permasalahan yang terjadi.²³

c. Penilaian *islamic corporate governance*

Nilai hasil *Islamic Corporate Governance* dikategorikan dalam peringkat 1 sampai 3, dimana masing-masing mencerminkan manajemen bank yang diterapkannya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Peringkat 1 ini mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan *Islamic Corporate Governance* secara umum dikatakan **sangat baik**. Dimana hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance* yang sangat memadai. Jika terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Islamic Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan terdapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen bank.
- 2) Peringkat 2 ini mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan *Islamic Corporate Governance* secara umum dikatakan **baik**. Dimana hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance* yang sangat memadai. Jika terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Islamic Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan terdapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen bank.

²³Ibid., 15- 18.

3) Peringkat 3 ini mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan *Islamic Corporate Governance* secara umum dikatakan **cukup baik**. Dimana hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance* yang sangat memadai. Jika terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Islamic Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan terdapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen bank.²⁴

3. Komite Audit

a. Definisi komite audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mendefinisikan komite audit sebagai komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris.²⁵ Hiro mendefinisikan komite audit adalah komite yang bertugas untuk membantu dewan pengawas organisasi dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas tugas auditor eksternal dan

²⁴Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/ 2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan), 100.

²⁵Indonesia POJK, "Salinan Peraturan Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04.2015 Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit," (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015), 2.

auditor internal.²⁶ Peraturan Bapepam-LK No.IX.1.5 menyatakan bahwa perusahaan publik diwajibkan untuk memiliki komite audit. Komite audit harus memiliki minimal tiga orang anggota dimana satu orang yang menjadi komisaris independen dan bertugas sebagai ketua komite audit serta dua orang anggota independen dari luar perusahaan yang telah menguasai dan mempunyai latar belakang di bidang akuntansi dan keuangan.²⁷

Setiap perusahaan di Indonesia diwajibkan untuk membentuk komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris melalui suatu surat keputusan dewan komisaris. Menurut Puradiredja tugas komite audit adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, dan pelaksanaan audit.²⁸ Menurut Rahmawati dan Marsono komite audit dengan jumlah anggota yang lebih banyak akan memiliki kemampuan dan kinerja yang lebih baik dalam menangani masalah perusahaan.²⁹

²⁶Lidia & Bonifasius H. Tambunan, "Peran Komite Audit dalam *Good Corporate Governance*," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Volume 21, Nomor 1, (2021), 121.

²⁷Febri Masak & Suzy Noviyanti, "Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap *Financial Distres*," *International Journal of Social Science and Business*, Volume 3, Nomor 3, (2019), 239.

²⁸Yunita Kurnia Shanti, "Pengaruh Komite Audit terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan Dewan Komisaris sebagai variabel *Intervening*," *Iqtishaduna*, Volume 9, Nomor 2, (2020), 150.

²⁹Ibid., 239

b. Peran komite audit

Ada beberapa peran komite audit, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Mendorong terbentuknya struktur pengawasan intern yang memadai.
- 2) Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan.
- 3) Mengkaji ruang lingkup dan ketetapan eksternal audit kewajaran biaya eksternal audit, serta kemandirian dan objektivitas eksternal auditor.
- 4) Mempersiapkan surat iuran tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit. Hal ini terkait dengan prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*).³⁰

c. Perhitungan komite audit

Menurut Arens et al. menjelaskan bahwa pada umumnya komite audit terdiri dari tiga atau lima kadang tuju orang yang bukan dari manajemen perusahaan. Tujuan dibentuknya komite audit yaitu untuk menjadi penengah antara auditor dan manajemen perusahaan apabila terjadi perselisihan.³¹ Dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.1.5/KEP-643/BL/2012, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit,

³⁰Ibid., 122.

³¹Mardani, Yesi Mutia Basri & M. Rasuli, ‘‘Pengaruh Komite Audit, Audit Internal dan Ukuran Persahaan terhadap Pengungkapan Kecurangan pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI 2018’’ *Al-Iqtishad*, Volume 1, Nomor 16 (2020), 6.

menjelaskan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Sedangkan komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratannya.³² Adapun cara untuk menghitung presentase komite audit, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \frac{\text{Pihak Independen}}{\text{Jumlah Anggota}} \times 100\%$$

Artinya komite audit yang jumlah anggotanya lebih banyak, akan memiliki kemampuan dan kinerja yang lebih baik dalam menangani permasalahan di perusahaan. Semakin banyak jumlah komite audit akan meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik dan mencegah kemungkinan terjadinya *fraud*.³³

B. Studi Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti mengambil kajian penelitian terdahulu guna untuk memperoleh bahan perbandingan dan acuan. Serta memudahkan untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian yang lainnya. Berikut kajian pustaka pada penelitian ini:

³²Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan No.1.5/KEP-643/BL/2012, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, 4.

³³Febri Masak & Suzy Noviyanti, "Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap *Financial Distres*," *International Journal of Social Science and Business*, Volume 3, Nomor 3, (2019), 239.

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

| No | Nama/Judul/Tahun | Metode Penelitian | Perbedaan dan Persamaan | Hasil Penelitian |
|----|--|--|---|---|
| 1 | Mifthahul Ridha dan Umiyati <i>Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance dan Non Performing Financing terhadap Pengungkapan Fraud Bank Umum Syariah</i> 2022 | Metode kuantitatif regresi data panel | Perbedaan: Tidak membahas komite audit Persamaan: Meneliti variable yang mempengaruhi <i>fraud</i> Variabel X yang sama <i>Islamic Corporate Governance</i> | <i>Islamic Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> ³⁴ |
| 2 | Enzelita Wahyuningsih <i>Pengaruh Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah</i> 2021 | Metode kuantitatif regresi linier berganda | Perbedaan: Tidak membahas komite audit Persamaan: Meneliti variable yang mempengaruhi <i>fraud</i> Variabel X yang sama <i>Islamic Corporate Governance</i> | <i>Islamic Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> ³⁵ |

³⁴Mifthahul Ridha dan Umiyati, ‘‘*Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance dan Non Performing Financing terhadap pengungkapan Fraud Bank Umum Syariah*,’’ *Jurnal Akuntansi dan Governance*, Volume 3, Nomor 1, (2022), 13.

³⁵Enzelita Wahyuningsih, ‘‘*Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Fraud Bank Umum Syariah*’’ *Skripsi* (Jakarta: UIN Jakarta, 2021), 94-95.

| No | Nama/Judul/Tahun | Metode Penelitian | Perbedaan dan Persamaan | Hasil Penelitian |
|----|--|--|---|---|
| 3 | Nurjanah Pengaruh <i>Sharia Compliance</i> dan <i>Islamic Corporate Governance</i> terhadap <i>Fraud</i> Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019 2021 | Metode kuantitatif regresi linier berganda | Perbedaan: Tidak membahas komite audit Persamaan: Meneliti variable yang mempengaruhi <i>fraud</i> Variabel X yang sama <i>islamic corporate governance</i> | <i>Islamic Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> . ³⁶ |
| 4 | Layyina Mawarda Pengaruh Pengungkapan <i>Shariah Compliance</i> dan <i>Islamic Corporate Governance</i> terhadap <i>fraud</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019 2021 | Metode kuantitatif regresi linier berganda | Perbedaan: Komite audit Persamaan: Meneliti variabel yang mempengaruhi <i>fraud</i> Variabel X yang sama <i>Islamic Corporate Governance</i> | <i>Islamic corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> ³⁷ |
| 5 | Phuji Maisaroh Pengaruh komite audit, <i>Good Corporate</i> | Metode kuantitatif regresi logistik | Perbedaan: Tidak membahas <i>Islamic Corporate Governance</i> | Komite audit berpengaruh terhadap <i>fraud</i> ³⁸ |

³⁶Nurjanah, "Pengaruh *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap *Fraud* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019," *Skripsi* (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021), 80.

³⁷Layyina Mawarda, "Pengaruh Pengungkapan *Shariah Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia" *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2021), 87.

³⁸Phuji Maisaroh, "Pengaruh komite audit, *good corporate governance* dan *whistleblowing system* terhadap *fraud* Bank Umum Syariah Perode 2016-2019" *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 153.

| No | Nama/Judul/Tahun | Metode Penelitian | Perbedaan dan Persamaan | Hasil Penelitian |
|----|--|---|--|---|
| | <i>Governance</i> dan <i>whistleblowing system</i> terhadap <i>Fraud</i> Bank Umum Syariah Periode 2016-2019 2021 | | Persamaan: Meneliti variable yang mempengaruhi <i>fraud</i> Variabel X yang sama komite audit | |
| 6 | Khairani Erlie Nurliasari & Tarmizi Achamad Pengaruh karakteristik komite audit terhadap kecurangan pelaporan keuangan 2020 | Metode kuantitatif dengan model Beneish M-score | Perbedaan: Tidak membahas <i>Islamic Corporate Governance</i> Persamaan: Meneliti variable yang mempengaruhi kecurangan pelaporan keuangan Variabel X yang sama komite audit | Komite audit tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan ³⁹ |
| 7 | Chindy Karmina Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> dan <i>sharia compliance</i> terhadap <i>fraud</i> pada Bank Umum Syariah 2020 | Metode kuantitatif regresi logistik | Perbedaan: Tidak membahas komite audit Persamaan: Meneliti variable yang mempengaruhi <i>fraud</i> Variabel X yang sama <i>Islamic Corporate Governance</i> | <i>Islamic Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap <i>fraud</i> ⁴⁰ |
| 8 | Mardani, Yesi Mutian | Metode | Perbedaan: | Komite audit |

³⁹Khairani Erlie Nurliasari & Tarmizi Achamad, "Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan" *Diponegoro Journal Of Accounting*, Volume 9, Nomor 1, (2020), 10.

⁴⁰Chindy Karmina, "Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah" *Jurnal Ilmiah MEA*, Volume 4, Nomor 3, (2020), 6.

| No | Nama/Judul/Tahun | Metode Penelitian | Perbedaan dan Persamaan | Hasil Penelitian |
|----|---|---|---|---|
| | Basri & M. Rasuli Pengaruh komite audit, audit internal dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan kecurangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 2018 2020 | kuantitatif regresi logistik | Tidak membahas <i>Islamic Corporate Governance</i> Persamaan: Meneliti variable yang mempengaruhi pengungkapan kecurangan Variabel X yang sama komite audit | berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan ⁴¹ |
| 9 | Rifqi Muhammad Analisis pengaruh <i>Syari'ah compliance</i> dan <i>Islamic Corporate Governance</i> terhadap tindakan <i>fraud</i> (studi empirik pada BUS di Indonesia periode 2013-2017) 2019 | Metode kuantitatif regresi data panel | Perbedaan: Tidak membahas komite audit Persamaan: Meneliti variable yang mempengaruhi <i>fraud</i> Variabel X yang sama <i>Islamic Corporate Governance</i> | <i>Islamic Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> ⁴² |
| 10 | Monika Budiman Pengaruh pengendalian internal, audit internal, <i>riskbased</i> audit, komite | Metode kuantitatif regresi linier berganda | Perbedaan: Tidak membahas <i>Islamic Corporate Governance</i> | Komite audit berpengaruh terhadap <i>fraud</i> ⁴³ |

⁴¹Mardani, Yesi Mutia Basri & M. Rasuli, "Pengaruh Komite Audit, Audit Internal dan Ukuran Persahaan terhadap Pengungkapan Kecurangan pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI 2018" *Al-Iqtishad*, Volume 1, Nomor 16, (2020), 14.

⁴²Rifqi Muhammad, "Analisis pengaruh *syari'ah compliance* dan *islamic corporate governance* terhadap tindakan *fraud* (studi empirik pada BUS di Indonesia periode 2013-2017)," *Iqtishadia*, Volume 6, Nomor 1, (2019), 76-77.

⁴³Monika Budiman, "Pengaruh pengendalian internal, audit internal, *risk based* audit, komite audit dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) serta implikasinya pada kualitas laporan keuangan," *Tesis* (Jakarta: STIE Jakarta, 2019), 247.

| No | Nama/Judul/Tahun | Metode Penelitian | Perbedaan dan Persamaan | Hasil Penelitian |
|----|--|--|---|---|
| | audit dan <i>whistleblowing system</i> terhadap pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>) serta implikasinya pada kualitas laporan keuangan 2019 | | Persamaan: Meneliti variable yang mempengaruhi <i>fraud</i> Variable X yang sama adalah komite audit | |
| 11 | Lulu Amalia Nusron Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi <i>fraud</i> di Bank Syariah 2017 | Metode kuantitatif regresi linier berganda | Perbedaan: Tidak membahas komite audit Persamaan: Meneliti variable yang mempengaruhi <i>fraud</i> Variable X yang sama adalah <i>Islamic Corporate Governance</i> | <i>Islamic Corporate Governance</i> tidak berpengaruh <i>fraud</i> ⁴⁴ |
| 12 | Bambang Leo Handoko & Kinanti Ashari Ramadhan Pengaruh karakteristik komite audit, keahlian keuangan dan ukuran perusahaan terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan 2017 | Metode kuantitatif regresi logistik biner | Perbedaan: Tidak membahas <i>Islamic Corporate Governance</i> Persamaan: Meneliti variable yang mempengaruhi kecurangan (<i>fraud</i>) Variable X yang sama adalah komite audit | Komite audit tidak berpengaruh terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan ⁴⁵ |

⁴⁴Lulu Amalia Nusroan, "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi *Fraud* di Bank Syariah," *Jurnal Bisnis & Akuntansi*, Volume 10, Nomor 1, (2020), 10.

⁴⁵Bambang Leo Handoko & Kinanti Ashari Ramadhan, "Pengaruh Komite Audit, Keahlian Keuangan dan Ukuran Perusahaan terhadap Kemungkinan Kecurangan Laporan Keuangan," *DeReMa Jurnal Manajemen*, Volume 12, Nomor 1, (2018), 108.

| No | Nama/Judul/Tahun | Metode Penelitian | Perbedaan dan Persamaan | Hasil Penelitian |
|----|---|--|--|---|
| 13 | Dinnul Alfian Akbar Relevansi <i>Fraud Triangle</i> pada Bank Syariah 2017 | Metode kuantitatif regresi linier berganda | Perbedaan: Tidak membahas komite audit Persamaan: Meneliti variabel yang mempengaruhi <i>fraud</i> Variabel X yang sama adalah <i>Islamic Corporate Governance</i> | <i>Islamic Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> ⁴⁶ |
| 14 | Geri Herdianto Analisis Faktor yang mempengaruhi <i>Fraud</i> di Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia 2016 | Metode kuantitatif regresi linier berganda | Perbedaan: Tidak membahas komite audit Persamaan: Meneliti variable yang mempengaruhi <i>fraud</i> Variable X yang sama adalah <i>Islamic Corporate Governance</i> | <i>Islamic Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> ⁴⁷ |
| 15 | Haifa Najib dan Rini Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi <i>Fraud</i> Bank Syariah | Metode kuantitatif regresi linier berganda | Perbedaan: Tidak membahas komite audit Persamaan: | <i>Islamic Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> ⁴⁸ |

⁴⁶Dinnul Alfian Akbar, "Relevansi *Fraud Triangle* pada Bank Syariah," *Simposium Nasional Akuntansi XX*, Volume 12, Nomor 3, (2017), 21.

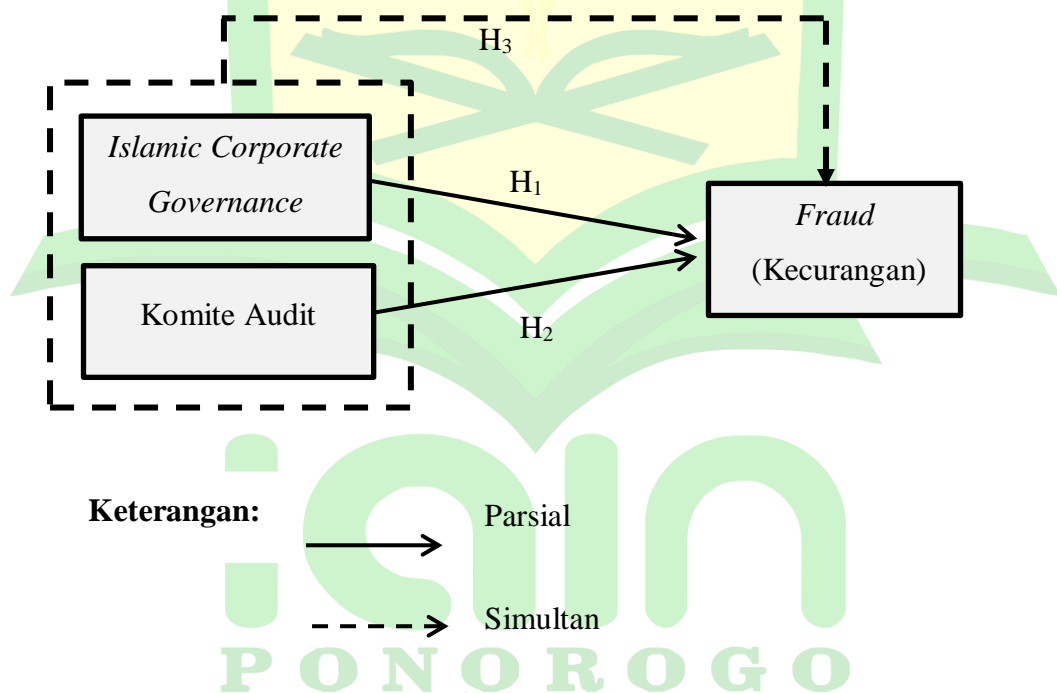
⁴⁷Geri Herdianto, "Analisis Faktor yang mempengaruhi *Fraud* di Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, Volume 10, Nomor 1, (2016), 33-34.

⁴⁸Haifa Najib dan Rini, "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *Fraud* Bank Syariah," *Simposium Nasional Akuntansi*, Volume 5, Nomor 6, (2016), 13.

| No | Nama/Judul/Tahun | Metode Penelitian | Perbedaan dan Persamaan | Hasil Penelitian |
|----|------------------|-------------------|--|------------------|
| | 2016 | | Meneliti variable yang mempengaruhi <i>fraud</i> Variabel X yang sama <i>Islamic Corporate Governance</i> | |

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan uraian tentang bagaimana peneliti mengalirkan jalan pikiran secara logis dalam rangka memecahkan masalah yang telah dirumuskan.⁴⁹ Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

⁴⁹Suryana, *Motodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Badung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 31.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang diajukan dan kebenarannya bersifat sementara.⁵⁰ Dikatakan jawaban sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.⁵¹ Berikut hipotesis yang dibangun oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *fraud* Bank Umum Syariah Non Devisa Tahun 2015-2020

Keberhasilan penerapan tata kelola perbankan syariah berdasarkan nilai peringkat, semakin tinggi peringkat, maka semakin baik pula tingkat penerapan tata kelola perbankan tersebut. Yangmana semakin tinggi nilai peringkat penerapan tata kelola berdasarkan prinsip syariah maka dapat menekan tingkat peluang terjadinya *fraud*.⁵²

H₀₁ : *Islamic Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap *fraud* Bank Umum Syariah Non Devisa Tahun 2015-2020

H_{a1} : *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap *fraud* Bank Umum Syariah Non Devisa Tahun 2015-2020

⁵⁰Suryani & Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenamedia Grup, 2015), 98.

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 64.

⁵²Chindy Karmina, “Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah” *Jurnal Ilmiah MEA*, Volume 4, Nomor 3, (2020), 1598.

2. Pengaruh komite audit berpengaruh secara parsial terhadap *fraud* Bank Umum Syariah Non Devisa Tahun 2015-2020

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk menjalankan pengawasan atas kegiatan perbankan syariah yang terkait dengan penelaahan atas informasi keuangan, pengendalian interal, manajemen resiko, efektifitas auditor internal dan eksternal dan kepatuhan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu komite audit disyaratkan harus memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan keuangan. Hal ini bertujuan agar komite audit mampu memberikan penilaian independen atas informasi yang diterimanya, mampu mengenali permasalahan dan memberikan solusi yang tepat. Perbankan syariah yang memiliki komite audit yang independen mampu mengurangi kegiatan penyimpangan yang dilakukan manajemen. Semakin banyak komite audit yang memiliki keahlian keuangan maka efektivitas komite audit semakin meningkat.⁵³

H₀₂ : Komite audit tidak berpengaruh terhadap *fraud* Bank Umum Syariah Non Devisa Tahun 2015-2020

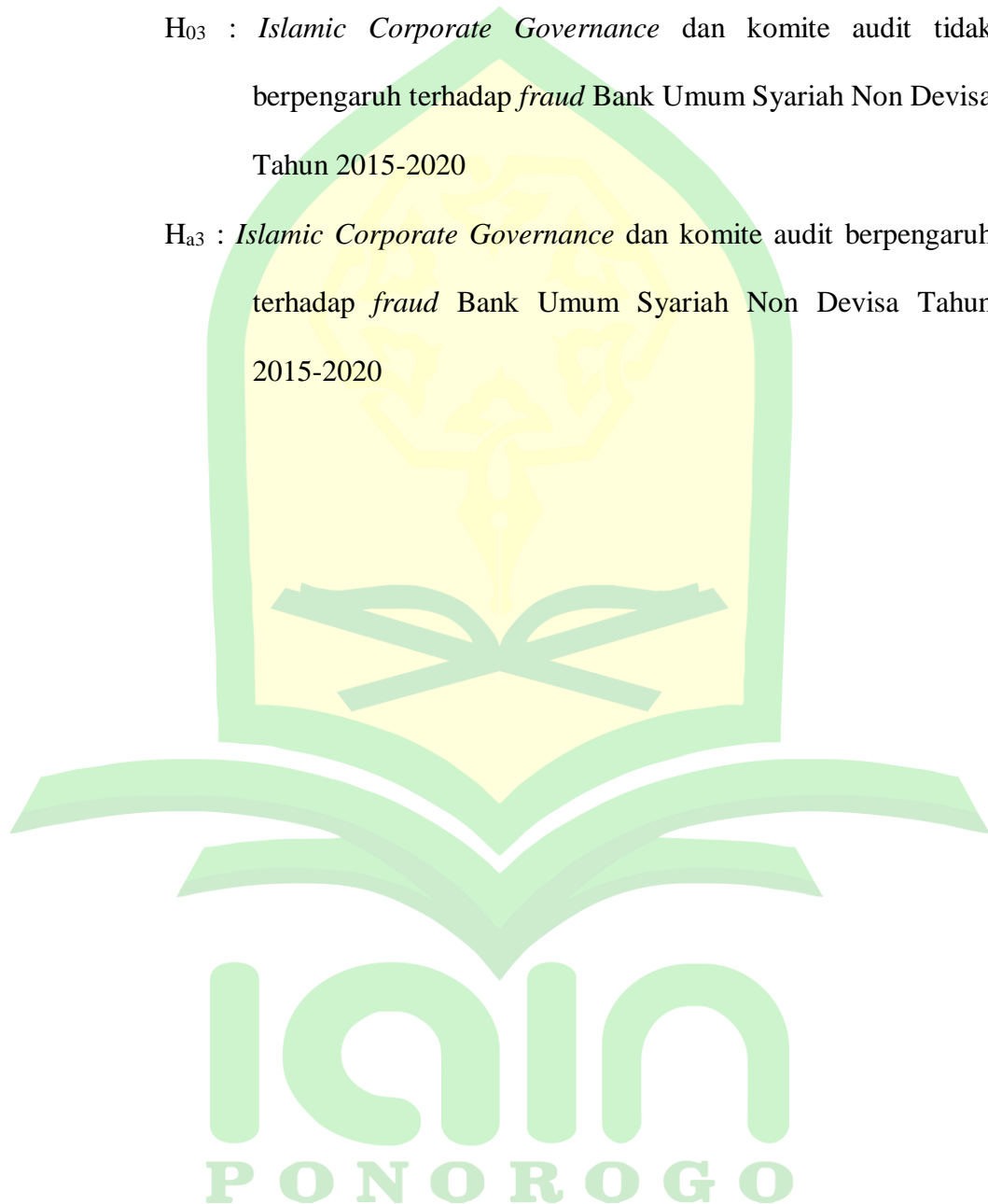
H_{a2} : Komite audit berpengaruh terhadap *fraud* Bank Umum Syariah Non Devisa Tahun 2015-2020

⁵³Mardani, Yesi Mutia Basri & M. Rasuli, ‘‘Pengaruh Komite Audit, Audit Internal dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Kecurangan pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI 2018’’ *Al-Iqtishad*, Volume 1, Nomor 16, (2020), 8-9.

3. Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap *fraud* Bank Umum Syariah Non Devisa Tahun 2015-2020

H₀₃ : *Islamic Corporate Governance* dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *fraud* Bank Umum Syariah Non Devisa Tahun 2015-2020

H_{a3} : *Islamic Corporate Governance* dan komite audit berpengaruh terhadap *fraud* Bank Umum Syariah Non Devisa Tahun 2015-2020



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian berlandaskan pada filsafat positif yang digunakan untuk meneliti pada sampel dan populasi tertentu, pengumpulan data berupa angka serta analisis data yang bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji teori.¹ Teori yang diuji peneliti adalah teori dari Hameed dan Rezaee dalam buku Rozmita Dewi YR. Data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian dokumen. Penelitian dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu dan didokumentasikan oleh suatu institusi tertentu dalam bentuk tulisan.² Jenis penelitian catatan peristiwa yang sudah berlalu dan didokumentasikan berupa data deret waktu (*time series*). Data deret waktu (*time series*) tersebut yang selanjutnya dianalisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini, adalah analisis statistik dengan tujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih.³

Penelitian kuantitatif ini, peneliti memilih pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan komite audit terhadap *fraud* dengan analisis regresi logistik. Analisis regresi logistik yang digunakan oleh penelitian adalah regresi logistik ordinal. Jenis regresi logistik dipilih oleh peneliti dikarenakan pada variabel

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 14.

²Ibid., 329.

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 65.

dependen *fraud* bersifat kategori bertingkat 3 yaitu (kode = 0) tidak terjadi *fraud*, (kode = 1) terjadi *fraud* rendah, dan (kode = 2) terjadi kasus *fraud* tinggi. Karena datanya memiliki tingkatan dan kategori yang dimiliki adalah 3, maka teknik analisis regresi logistik yang cocok dan harus digunakan adalah regresi logistik ordinal.

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu nilai atau sifat atau atribut dari orang, kegiatan atau objek yang mempunyai variansi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴ Variabel penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

a. Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini yakni *fraud*.

b. Variabel Bebas

Variabel bebas merupakan variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yakni *Islamic Corporate Governance* dan komite audit.

2. Definisi operasional

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 38

Definisi operasional dalam penelitian ini ditunjukkan dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1
Definisi Operasional⁵

| Variabel Penelitian | Definisi | Skala Pengukuran | Pengukuran Operasional |
|---|--|------------------|--|
| <i>Fraud</i> (Y) | <i>Fraud</i> adalah tindakan melawan hukum, penipuan berencana dan bermakna ketidakjujuran. <i>Fraud</i> dapat digolongkan dalam bentuk kejahatan diantaranya penggelapan aset, penggelapan informasi, penggelapan kewajiban, pencurian, penyembunyian atau penghilangan fakta. ⁶ | Ordinal | <p>a. Y = 0, Apabila selama tahun penelitian Bank Umum Syariah Non Devisa tidak mengalami satupun kasus <i>fraud</i> (kecurangan) atau dapat dikatakan 0 (nol) kasus.</p> <p>b. Y = 1, Apabila selama tahun penelitian Bank Umum Syariah Non Devisa mengalami kasus <i>fraud</i> (kecurangan) yang ≤ 2, artinya kasus <i>fraud</i> rendah.</p> <p>c. Y = 2, Apabila selama tahun penelitian Bank Umum Syariah Non Devisa mengalami kasus <i>fraud</i> (kecurangan) ≥ 3, artinya kasus <i>fraud</i> tinggi.</p> |
| <i>Islamic Corporate Governance</i> (X _i) | Suatu sistem nilai penerapan tata kelola dengan berlandaskan prinsip-prinsip islam yang mengatur hubungan berbagai pihak yang terlibat dalam perbankan syariah, sehingga | Ordinal | Memberikan angka dengan data sesuai hasil penerapan <i>Islamic Corporate Governance</i> yang dilaporkan masing-masing Bank Umum Syariah Non Devisa yaitu dengan peringkat 1 sampai 3 1 = Sangat baik 2 = Baik 3 = Cukup baik |

⁵Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 177.

⁶Dien Novianty Rahmatika, *Fraud Auditing Kajian Teoretis dan Empiris* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 14.

| Variabel Penelitian | Definisi | Skala Pengukuran | Pengukuran Operasional |
|--------------------------------|---|------------------|---|
| | mereka dapat melaksanakan kewajiban dan haknya secara baik dan benar untuk meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang berkepentingan (<i>stakeholder</i>) dalam rangka ibadah kepada Allah. ⁷ | | |
| Komite Audit (X ₂) | Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya. ⁸ | Rasio | Komite audit dapat dilihat dengan presentase antara jumlah komite audit yang berasal dari independen dengan keseluruhan anggota komite audit yang dimiliki oleh masing-masing Bank Umum Syariah Non Devisa dalam satu periode tertentu. |

C. Lokasi dan Perode Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada Bank Umum Syariah Non Devisa di Indonesia. Dimana peneliti menggunakan data laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah Non Devisa dengan periode waktu 6 tahun (2015 - 2020).

⁷Sarah Sakinah Putri, "Penerapan Prinsip *Islamic Corporate Governance* pada BMT Al-Hijrah Kota Bukittinggi," *Skripsi* (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2021), 17.

⁸Indonesia POJK "Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit" (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015), 2.

D. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan atau ingin diteliti.⁹ Populasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, adalah 6 Bank Umum Syariah Non Devisa di Indonesia yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2015 hingga 2020.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apa yang didapat dan dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi sehingga dapat digunakan untuk suatu penelitian yang harus benar-benar representatif (mewakili).¹⁰ Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan keperluan penelitian, artinya setiap unit yang diambil dan dipilih dari populasi dengan sengaja berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu.¹¹ Bank Umum Syariah Non Devisa yang telah memenuhi kriteria yang akan dijadikan sebagai sampel yaitu 6 Bank Umum Syariah Non Devisa tahun 2015-2020. Berikut 6 Bank Umum Syariah Non Devisa yang dijadikan sampel ditunjukkan pada Tabel 3.2

⁹Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Renika Cipta, 2013), 173.

¹⁰Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2016), 62.

¹¹Masayu Rosyidah & Rafiq Fijra, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2021),

Tabel 3.2
Sampel Penelitian

| No. | Bank Umum Syariah Non Devisa |
|-----|------------------------------|
| 1 | Bank BRI Syariah |
| 2 | Bank BCA Syariah |
| 3 | Bank Syariah Bukopin |
| 4 | Bank Panin Syariah |
| 5 | Bank Victoria Syariah |
| 6 | Bank BJB Syariah |

Sumber: Website Bank Umum Syariah Non Devisa

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan tahunan 6 Bank Umum Syariah Non Devisa selama 6 tahun, yaitu mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2020. Laporan keuangan tahunan diakses melalui *website* ke-6 Bank Umum Syariah Non Devisa. Berikut 6 Bank Umum Syariah Non Devisa yang dijadikan sampel ditunjukkan pada Tabel 3.3

Tabel 3.3
Sumber Data Penelitian

| No. | Bank Umum Syariah Non Devisa | Sumber Data |
|-----|------------------------------|--|
| 1 | Bank BRI Syariah | www.brisyariah.co.id |
| 2 | Bank BCA Syariah | www.bcasyariah.co.id |
| 3 | Bank Syariah Bukopin | www.syariahbukopin.co.id |
| 4 | Bank Panin Syariah | www.paninbanksyariah.co.id |
| 5 | Bank Victoria Syariah | www.bankvictoriasyariah.co.id |
| 6 | Bank BJB Syariah | www.bjbsyariah.co.id |

Sumber: Website masing-masing Bank Umum Syariah Non Devisa

F. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian

melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan).¹² Dalam penelitian ini, peneliti memakai data sekunder, dimana data sekunder didapat dari laporan keuangan tahunan yang telah dipublikasikan oleh masing-masing Bank Umum Syariah Non Devisa. Pada penelitian ini menggunakan data deret waktu atau *time series*, yang merupakan sekumpulan data dari fenomena tertentu yang didapat dalam beberapa periode waktu.¹³

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dalam rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan dan penafsiran data untuk memahami apa yang terdapat dibalik semua data tersebut sehingga mudah dimengerti.¹⁴ Analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam menganalisis bagaimana pengaruh *Islamic Corporate Government* dan komite audit terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah Non Devisa 2015-2020. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi logistik menggunakan aplikasi SPSS versi 16.0 untuk membantu mengolah datanya. Berikut adalah teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Analisis statistik deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal yang berkaitan dengan nilai rata-rata (*mean*), nilai tengah

¹²Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 85.

¹³Ma'ruf Abullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Aswaja Preesindo, 2015), 247.

¹⁴Sandu Siyoto & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Leterasi Media Publishing, 2015), 109-110.

(*median*), nilai yang sering muncul (*modus*) dan presentase.¹⁵ Sedangkan menurut Sugiyono, analisis deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.¹⁶

2. Analisis regresi logistik ordinal

Pengujian statistika yang dilakukan oleh peneliti menggunakan analisis *multivariate* dengan regresi logistik (*logistic regression*). Regresi logistik merupakan sebuah metode analisis dimana variabel bebas mempengaruhi variabel tergantung dengan pengukuran variabel yang bersifat *dummy* atau bernilai 0 dan 1.¹⁷ Dalam penelitian ini, uji hipotesis menggunakan analisis regresi logistik ordinal (*ordinal logistic regression*). Regresi logistik ordinal merupakan pemodelan regresi logistik untuk data prediktor respons dengan respons kategorik ordinal *non-biner* (kategorik ordinal dengan jumlah kategori lebih daripada dua). Alasan menggunakan analisis regresi ordinal dalam penelitian ini, dikarenakan variabel dependen (*fraud*) terbagi menjadi 3 kategori data berperingkat, yaitu (kode

¹⁵Ali Baroroh, *Trik-trik Analisis Statistik dengan SPSS15* (Jakarta: PT Elex Media Komputiduno, 2008), 1.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 147.

¹⁷Kurniawan, *Analisis Data Menggunakan Atata SE 14(Panduan Analisis, Langkah Lebih Cepat, Lebih Mudah dan Paling Praktis* (Sleman: Budi Utama, 2019), 103.

= 0) untuk yang tidak terjadi kasus *fraud*, (kode = 1) untuk yang terjadi kasus *fraud* rendah, dan (kode = 2) untuk yang terjadi kasus *fraud* tinggi.¹⁸ Pada perhitungan tersebut, peneliti menentukan batas maksimal kasus *fraud* rendah yakni 2. Artinya, jika selama tahun penelitian pada Bank Umum Syariah Non Devisa mengalami kasus sebanyak ≤ 2 kasus *fraud*, maka diberi kode 1 yang menyatakan bahwa kasus tersebut masuk dalam kategori *fraud* rendah. Dan jika kasus *fraud* tinggi yakni 3. Artinya, jika selama tahun penelitian pada Bank Umum Syariah Non Devisa mengalami kasus sebanyak ≥ 3 kasus *fraud*, maka diberi kode 3 yang menyatakan bahwa kasus tersebut masuk dalam kategori *fraud* tinggi. Serta jika tidak terjadi kasus *fraud* 0, maka diberikan kode 0.¹⁹

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis regresi logistik ordinal yaitu sebagai berikut:

a. Menilai kelayakan model regresi

Goodness of fit test dalam regresi logistik digunakan untuk mengetahui kebaikan model. Sebagaimana dalam *uji goodness of fit test* regresi linier berganda dengan menggunakan ukuran koefisien determinasi.²⁰ Apabila *goodness of fit test* menghasilkan yang sesuai model itu baik, maka model tersebut dapat diterima. Sedangkan sebaliknya apabila *goodness of fit* menghasilkan yang sesuai model itu

¹⁸Johan Harlan, *Analisis Regresi Logistik* (Depok: Gunadarma, 2018), 85.

¹⁹Suyanto dkk, *Analisis Data Penelitian: Petunjuk Praktis Bagi Mahasiswa Kesehatan Menggunakan SPSS* (Semarang: Unissila, 2018), 77.

²⁰Agus Widarjono, *Analisis Multivariat Terapan Dengan Program SPSS, AMOS dan SMARTPLS* (Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2015), 113.

buruk, maka model tersebut harus ditolak.²¹ Pada aplikasi output SPSS 16.0, kelayakan model regresi logistik ditunjukkan pada Tabel *goodness of fit test* melalui *deviance* dan *pearson*. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini, bertujuan untuk menilai tidak atau layaknya model regresi yaitu sebagai berikut:

H_0 : Model mampu menjelaskan data dengan baik (tidak terdapat perbedaan antara klasifikasi yang diamati dengan klasifikasi hasil prediksi)

H_a : Model tidak mampu menjelaskan data dengan baik (terdapat perbedaan antara klasifikasi yang diamati dengan klasifikasi hasil prediksi).²²

Berikut ini, adalah dasar keputusan *goodness of fit test* yang diambil:

- 1) Apabila nilai signifikansi *goodness of fit test* $> 0,05$ maka hipotesis (H_0) diterima yang artinya model mampu menjelaskan data dengan baik (tidak terdapat perbedaan antara klasifikasi yang diamati dengan klasifikasi hasil prediksi)
- 2) Apabila nilai signifikansi *goodness of fit test* $< 0,05$ maka hipotesis (H_a) ditolak yang artinya model tidak mampu menjelaskan data

²¹Henry Latan, *Structural Equation Modeling: Konsep dan Aplikasi Menggunakan Program LISREL 8.80* (Bandung: Alfabeta, 2012), 48.

²²Aurino R.A. Djamaris, *Pemanfaatan Regresi Logistik Ordinal dan Multinomial Dengan SPSS* (Jakarta: Universitas Bakrei, 2021), 15.

dengan baik (terdapat perbedaan antara klasifikasi yang diamati dengan klasifikasi hasil perediksi).²³

b. Uji keseluruhan model (*overall moodel fit test*)

Uji statistika ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen didalam regresi logistik secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau uji F dalam regresi linear yang berdasarkan pada nilai statistika -2LL (-2 *Loglikelihood*) dengan kata lain nilai LR.²⁴ Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah *model fit* dengan data, baik sebelum atau sesudah variabel bebas dimasukkan kedalam model. Adapun hipotesis yang digunakan untuk menilai *model fit* adalah sebagai berikut:

H₀ : Model tidak *fit* artinya variabel independen tidak berpengaruh simultan terhadap variabel dependen.

H_a : Model *fit* artinya variabel independen berpengaruh simultan terhadap variabel dependen.²⁵

Berikut ini, adalah dasar keputusan *overall moodel fit test* yang diambil:

a) Apabila nilai sig (*chi-square*) < 0,05 maka H_a ditolak, artinya *model fit* variabel independen berpengaruh simultan terhadap

²³Ibid., 333.

²⁴Agus Widarjono, *Analisis Multivariat Terapan Dengan Orogram SPSS, AMOS, dan SMARTPLS* (Yogyakarta: UPP STIM YKPM, 2015), 113.

²⁵Yosephine Endah Nur Diani, 'Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengungkapan Keberadaan *Risk Managemen Committee* pada *High Profile*,' *Skripsi* (Semarang: UI Semarang, 2013), 60.

variabel dependen (model dengan variabel independen lebih baik dari *model intercept*)

b) Apabila nilai sig (*chi-square*) > 0,05 maka H_0 diterima , artinya model tidak *fit* variabel independen tidak berpengaruh simultan terhadap variabel dependen (model dengan *intercept* lebih baik dari model dengan variabel independen).²⁶

c. Uji parsial (*wald test*)

Setelah menguji kabaikan garis regresi dan uji serempak, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji segnifikasi variabel independen secara individual. Uji signifikasi variabel independen terhadap variabel independen secara individual dalam model multinominal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu uji wald sebagaimana regresi binary logit atau multinominal dan bisa juga uji likelihood ratio test.²⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *uji wald*. Dari *uji wald* dapat diketahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen didalam model regresi logistik ordinal. Hasil *uji wald* dapat dilihat pada Tabel *Parameter Estimates*. Adapun hipotesis yang digunakan dalam *wald test* yaitu sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang secara signifikan

H_a : Terdapat pengaruh yang secara signifikan

²⁶Kadir, Statitik Penerapan Konsep, Contoh dan analisis Data dengan Program *SPSS/Lisrel* Penelitian (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 462.

²⁷Ibid., 125.

Nilai statistika *wald test* akan mengikuti distribusi *chi-square*, dalam uji statistika t yakni secara parsial termasuk model regresi. Berikut ini, adalah dasar keputusan uji parsial (*wald test*) yang diambil:

- a) Apabila $\text{sig} < 0,05$ maka H_a ditolak yang berarti terdapat pengaruh secara signifikan
 - b) Apabila $\text{sig} > 0,05$ maka H_0 diterima yang berarti tidak terdapat pengaruh secara signifikan.²⁸
- d. Tingkat kemampuan model (*psaudo Rsquare/R²*)

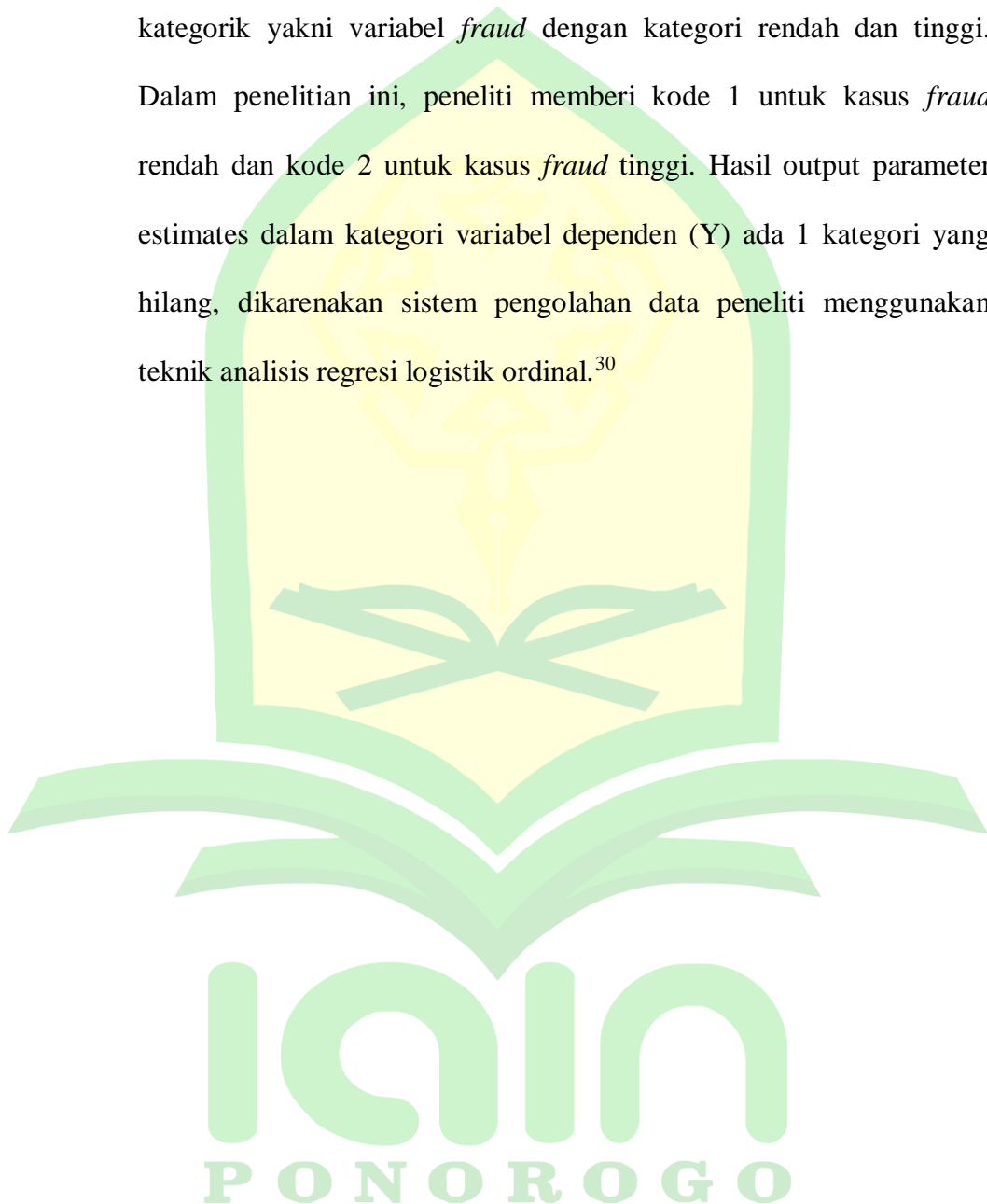
Koefisien determinasi pada regresi logistik dilihat dari *Nagelkerke R Square*. *Nagelkerke R Square* adalah modifikasi dari koefisien untuk memastikan bahwa nilai akan bervariasi dari 0 sampai 1. Nilai *Nagelkerke R Square* yang mendekati 0 menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan nilai *Nagelkarke R Square* yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen mampu untuk memberikan semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variabilitas variabel dependen.²⁹

²⁸Nurlia Aldilarachma, “Analisis Rasio Keuangan Perusahaan yang melakukan Merger dan Akuisis dengan Metode Logistik,” *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), 70.

²⁹Desriana, “Pengaruh *Profit Sharing Ratio Zakat performance ratio, islamic income ratio* dan *Firm Size* terhadap *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Perode 2012-2017,” *Skripsi* (Palembang: UIN Raden Fatah, 2019), 41.

e. Estimasi parameter (*parameter estimates*)

Estimasi parameter ini digunakan untuk bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang sifatnya kategorik yakni variabel *fraud* dengan kategori rendah dan tinggi. Dalam penelitian ini, peneliti memberi kode 1 untuk kasus *fraud* rendah dan kode 2 untuk kasus *fraud* tinggi. Hasil output parameter estimates dalam kategori variabel dependen (Y) ada 1 kategori yang hilang, dikarenakan sistem pengolahan data peneliti menggunakan teknik analisis regresi logistik ordinal.³⁰



³⁰Ibid., 120.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek yang dijadikan sebagai penelitian adalah Bank Umum Syariah non devisa yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Tahun 2015-2020. Pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan keperluan dan pertimbangan atau kriteria tertentu.¹ Dalam hal ini, Bank Umum Syariah Non Devisa ada 6, dimana 6 bank tersebut dijadikan sampel penelitian. Berikut ini, gambaran Bank Umum Syariah Non Devisa yang termasuk dalam sampel penelitian:

1. Bank BRI Syariah

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. bermula dari sebuah akuisisi Bank Jasa Artha oleh Bank BRI pada tanggal 19 Desember 2007. Setelah memperoleh izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008, bank yang awalnya beroperasi secara konvensional, kini resmi menjadi sebagai bank syariah pada 17 November 2008. Prinsip nilai-nilai yang dijadikan pedoman budaya kerja bank BRI Syariah merupakan antusias, profesional, penghargaan terhadap sumber daya manusia, berorientasi bisnis, tawakkal, integritas, dan kepuasan pelanggan.²

¹Masayu Rosyidah & Rafiq Fijra, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 129.

²Bank BRI Syariah, www.bankbrisyariah.co.id, (diakses pada tanggal 10 Desember 2022, jam 09.00).

2. Bank BCA Syariah

Berdasarkan akta Akuisisi No. 72 pada 12 Juni 2009 yang dibuat didepan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, PT. Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya akan dijadikan sebagai Bank BCA Syariah. Selain itu, Bank BCA Syariah juga menjual 1 lembar saham ke BCA Finance, dimana kepemilikan saham sebanyak 99,9997% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk, dan sisanya 0,0003% dimiliki oleh PT BCA Finance. Perubahan kegiatan operasional Bank dari bank konvensional menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia pada 2 Maret 2010. Dengan mendapat izin tersebut, tanggal 5 April 2010, Bank BCA Syariah resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah. Bank BCA Syariah berkomitmen sebagai perbankan induk dan memegang saham mayoritas berbagai pelayanan yang bermanfaat bagi nasabah BCA Syariah, seperti tarik tunai dan debit di seluruh ATM dan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) milik BCA hingga setoran (pengiriman uang), semua tanpa dikenakan biaya. Kemudian, untuk memperoleh informasi ataupun menyampaikan keluhan dan pengaduan, nasabah dan masyarakat bisa menghubungi melalui HALO BCA di 1500888.³

³Bank BCA Syariah, www.bankbcasyariah.co.id, (diakses pada tanggal 10 Desember 2022, jam 09.45).

3. Bank Syariah Bukopin

Bank Syariah Bukopin sebagai bank kegiatan operasionalnya berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah yang berawal sejak masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisi oleh PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008. Dengan melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan perubahan nama PT Bank Persyarikatan Indonesia menjadi PT Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008. Kegiatan operasional Bank Bukopin Syariah secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 - 2009.⁴

4. Bank Panin Syariah

Bank Panin Dubai Syariah berada di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Panin Life Centre Jl. Letjend S Parman Kav. 91 Jakarta Barat. Pada pasal 3 anggaran dasar Bank Panin Dubai Syariah, ruang lingkup kegiatannya adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Bank Panin Dubai Syariah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia pada 6 Oktober 2009

⁴Bank Syariah Bukopin, www.syariahbukopin.co.id, (diakses pada tanggal 10 Desember 2022, jam 10.25).

sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada tanggal 2 Desember 2009.⁵

5. Bank Victoria Syariah

Bank Victoria Syariah didirikan pertama kalinya dengan nama PT. Bank Swaguna berdasarkan pada akta No. 9 tanggal 15 April 1996. Akta tersebut kemudian diganti dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 4 tanggal 5 September 1997 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. JA.5/79/5 tanggal 7 November 1997. Kemudian PT, Bank Swaguna diganti lagi namanya menjadi Bank Victoria Syariah yang sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 5 tanggal 6 Agustus 2009. Perubahan kegiatan operasional Bank Victoria Syariah dari Bank Umum Konvensional hingga jadi Bank Umum Syariah telah memperoleh perizinan dari Bank Indonesia berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/8/KEP.GBI/DpG/2010 pada tanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah sejak 1 April 2010.⁶

6. Bank BJB Syariah

Pendirian Bank Jabar Banten Syariah berawal dengan pembentukan Divisi atau Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa

⁵Bank Panin Syariah, www.paninbanksyariah.co.id, (diakses pada tanggal 10 Desember 2022, jam 11.00).

⁶Bank Victoria Syariah, www.bankvictoriasyariah.co.id, (diakses pada tanggal 12 Desember 2022, jam 08.45).

Barat dan Banten Tbk. pada 20 Mei 2000, yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat wilayah Jawa Barat yang awalnya tumbuh keinginannya untuk memakai jasa perbankan syariah. Setelah 10 tahun Unit Usaha syariah beroperasi, pihak dari manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. berpandangan untuk mempercepat perkembangan usaha syariah dan mendukung program-program Bank Indonesia dalam meningkatkan *share* perbankan syariah. Maka dengan persetujuan dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk menjadikan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah. Sehingga saat ini, Bank Jabar Banten Syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Braga No 135, dan telah memiliki 8 kantor cabang, kantor cabang pembantu 55, serta memiliki jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dan 49.630 jaringan ATM Bersama.⁷

B. Hasil Pengujian Deskripsi

Pengujian statistik deskriptif yang dilakukan peneliti adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai objek penelitian. Dimana dengan memberi penjelasan mengenai statistik deskriptif, diharapkan dapat diketahui gambaran awal mulai tentang permasalahan yang diteliti. Hasil pengujian statistik deskripsi pada setiap variabel diolah oleh peneliti menggunakan aplikasi *software* SPSS 16.0 yaitu, sebagai berikut:

⁷Bank BJB Syariah, www.bjbsyariah.co.id, (diakses pada tanggal 12 Desember 2022, jam 09.15).

1. *Fraud*

Fraud merupakan variabel dependen yang menunjukkan keseluruhan total kasus *fraud* pada Bank Umum Syariah Non Devisa tahun 2015 sampai 2020. Data *fraud* yang dipakai oleh peneliti adalah seluruh kejadian *fraud* yang dianggap dan dilaporkan memiliki dampak negatif secara signifikan terhadap nasabah dan bank. Berikut ini statistika total dan presentase keseluruhan kasus *fraud* pada Bank Umum Syariah Non Devisa Tahun 2015 hingga 2020 dapat disajikan pada Tabel 4.1

Tabel 4.1
Distribusi *Fraud* Bank Umum Syariah Non Devisa Tahun 2015-2020

| Kategori <i>Fraud</i> | Jumlah (N) | Presentase (%) |
|--|-------------------|-----------------------|
| 0 = Tidak Terjadi Kasus <i>Fraud</i> | 15 | 41,7 |
| 1 = Terjadinya Kasus <i>Fraud</i> Rendah | 9 | 25,0 |
| 2 = Terjadinya Kasus <i>Fraud</i> Tinggi | 12 | 33,3 |
| Total | 36 | 100% |

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 16, 2022

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa distribusi kasus *fraud* Bank Umum Syariah Non Devisa Tahun 2015-2020 terbagi dalam 3 kategori yaitu 0 = tidak terjadi kasus *fraud*, 1 = terjadi kasus *fraud* rendah, dan 2= terjadi kasus *fraud* tinggi. Pada Tabel 4.1 diketahui bahwa variabel *fraud* dinyatakan dalam jumlah data (N) sebanyak 36. Hasil distribusi kasus *fraud* merata untuk masing-masing kategori. Distribusi *fraud* paling dominan adalah kategori 0 yaitu tidak terjadi kasus *fraud* yang berjumlah 15 dengan presentase 41,7%. Kemudian distribusi terbanyak kedua adalah kategori 2 yaitu terjadi kasus *fraud* tinggi yang berjumlah 12 dengan presentase sebesar 33,3%. Sedangkan distribusi *fraud* untuk kategori 1

yaitu terjadi kasus *fraud* rendah berjumlah 9 dengan presentase sebesar 25,0%.

2. *Islamic Corporate Governance*

Islamic Corporate Governance adalah variabel yang menunjukkan penerapan tata kelola bank yang baik dengan melihat nilai penerapannya pada masing-masing Bank Umum Syariah Non Devisa. Berikut ini, statistik berupa jumlah (N) dan presentase dari *Islamic Corporate Governance* disajikan pada Tabel 4.2

Tabel 4.2
Distribusi Presentase *Islamic Corporate Governance* Bank Umum
Syariah Non Devisa Tahun 2015-2020

| Peringkat <i>Islamic Corporate Governance</i> | Jumlah (N) | Presentase (%) |
|--|-------------------|-----------------------|
| 1 = Sangat Baik | 6 | 16,7 |
| 2 = Baik | 20 | 55,6 |
| 3 = Cukup | 10 | 27,8 |
| Total | 36 | 100% |

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 16, 2022

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa peringkat nilai *islamic corporate governance* pada Bank Umum Syariah yang terbagi dalam 3 peringkat yaitu peringkat 1 = penerapan *Islamic Corporate Governance* sangat baik, peringkat 2 = penerapan *Islamic Corporate Governance* baik, peringkat 3 = penerapan *Islamic Corporate Governance* cukup baik. Pada Tabel 4.2 diketahui bahwa variabel *Islamic Corporate Governance* dinyatakan dalam jumlah data (N) sebanyak 36. Hasil distribusi peringkat penerapan *Islamic Corporate Governance* yang paling dominan adalah peringkat 2 yaitu penerapan *Islamic Corporate Governance* secara baik yang berjumlah 20 dengan presentase distribusi sebesar 55,6%. Kemudian

peringkat 3 yaitu penerapan *Islamic Corporate Governance* secara cukup baik yang berjumlah 10 dengan presentase distribusi sebesar 27,8%. Sedangkan distribusi untuk peringkat 1 yaitu penerapan *Islamic Corporate Governance* dengan sangat baik berjumlah 6 dengan presentase distribusi sebesar 16,7%.

3. Komite Audit

Komite audit merupakan variabel independen yang menunjukkan presentase antara jumlah anggota komite audit yang berasal dari pihak independen terhadap jumlah anggota komite audit secara keseluruhan yang ada pada Bank Umum Syariah Non Devisa. Berikut ini, deskripsi statistik yang berupa jumlah data, *mean*, standar deviasi, maksimum dan minimum dari variabel komite audit disajikan pada Tabel 4.3

Tabel 4.3
Distribusi Presentase Komite Audit Bank Umum Syariah Non Devisa Tahun 2015-2020

| Variabel | Jumlah (N) | Mean | Minimum-Maksimum |
|--------------|------------|--------|------------------|
| Komite Audit | 36 | 46,59% | 16,66% - 66,67% |

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 16, 2022

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa variabel komite audit jumlah (N) sebesar 36. Nilai *mean* (rata-rata) presentase komite audit yang berasal dari pihak independen terhadap jumlah anggota komite audit secara keseluruhan sebesar 46,59%. Presentase yang dimiliki komite audit dengan jumlah minimum sebesar 16,66% berasal dari pihak independen terhadap jumlah keseluruhan anggota komite audit. Presentase minimum tersebut terdapat pada Bank Panin Syariah tahun 2020. Sedangkan

presentase maksimum komite audit sebesar 66,67% terdapat pada Bank BCA Syariah tahun 2015 dan Bank Victoria Syariah Tahun 2015.

C. Hasil Uji Regesi Logistik Ordinal

1. Menilai Kelayakan Model Regresi

Untuk penilaian kelayakan model regresi logistik ordinal dilakukan pengujian hipotesis nol (H_0) dengan data empiris yang sesuai atau cocok dengan model. Apabila *goodness of fit test* yang hasilnya suatu model itu baik, maka model tersebut dapat menerima. Dan sebaliknya apabila *goodness of fit test* yang hasilnya suatu model itu buruk, maka model tersebut harus menolak. Hasil dari pengujian kelayakan model regresi logistik ordinal dengan menggunakan metode *pearson* dan *deviance* ditunjukkan dalam Tabel 4.4 yaitu, sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Pengujian Kelayakan Model Regresi Logistik
Ordinal *Goodness-of-Fit*

| | Chi-Square | Df | Sig |
|----------|------------|----|-------|
| Pearson | 29,216 | 27 | 0,351 |
| Deviance | 28,940 | 27 | 0,364 |

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 16, 2022

Berdasarkan Tabel 4.4 memperoleh hasil pengujian kelayakan model regresi logistik ordinal melalui nilai *pearson* dan *deviance* yaitu memiliki nilai signifikansi masing-masing adalah 0,351 dan 0,364. Nilai signifikansi yang diperoleh nilai *pearson* adalah $0,351 > 0,05$ dan nilai *deviance* $0,364 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% model logit yang diperoleh telah cocok dan sesuai dengan data atau model tersebut layak untuk digunakan. Sehingga H_0 diterima,

yang artinya tidak terdapat perbedaan antara klasifikasi yang diamati dengan klasifikasi hasil prediksi atau dapat dikatakan bahwa model mampu menjelaskan data dengan baik.

2. Uji Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Uji *overall model fit* ini dilakukan untuk mengetahui apakah model *fit* dengan data, baik sebelum dan sesudah variabel bebas dimasukkan kedalam model. Hasil uji pengaruh variabel *islamic corporate governance* (X_1), dan komite audit (X_2) secara serentak (simultan) terhadap variabel dependen *fraud* (Y) melalui uji keseluruhan model (*overall model fit test*) ditunjukkan pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5

Hasil Pengujian Keseluruhan Model *Fitting Information*

| Model | -2 Log Likelihood | Chi-Square | df | Sig |
|----------------|-------------------|------------|----|-------|
| Intercept Only | 55,061 | | | |
| Final | 44,012 | 11,049 | 3 | 0,011 |

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 16, 2022

Berdasarkan Tabel 4.5 memperoleh hasil pengujian keseluruhan model (*overall model fit test*) regresi logistik ordinal yang memiliki nilai signifikansi sebesar $0,011 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, maka variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen, atau dapat dikatakan bahwa model dengan variabel independen mampu menjelaskan model lebih baik daripada model dengan hanya *intercept*. Sehingga H_{a3} ditolak, yang artinya *Islamic Corporate Governance* dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap *fraud*.

3. Uji Parsial (*Wald Test*)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen didalam model regresi logistik ordinal. Pada hasil output regresi logistik ordinal, hasil uji *wald* dapat dilihat pada Tabel parameter estimates. Hasil uji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen melalui uji *wald test* ditunjukkan pada Tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Parsial (*Wald Test*)

| Variabel | Estimate (β) | Standar error | Wald | Sig | Keterangan |
|-----------------|----------------------|---------------|-------|-------|------------------|
| Threshold (Y=0) | -4,029 | 1,341 | 9,025 | 0,003 | Signifikan |
| Threshold (Y=1) | -2,706 | 1,234 | 4,808 | 0,028 | Signifikan |
| (X1 = 1) | -1,980 | 1,137 | 3,029 | 0,082 | Tidak Signifikan |
| (X1 = 2) | -1,177 | 0,798 | 2,198 | 0,138 | Tidak Signifikan |
| (X1 = 3) | 0 ^a | . | . | . | |
| X2 | -0,056 | 0,24 | 5,171 | 0,023 | Signifikan |

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 16, 2022

a. *Islamic Corporate Governance*

Berdasarkan Tabel 4.6, memperoleh hasil bahwa variabel *Islamic Corporate Governance* peringkat 1 yaitu penerapan *Islamic Corporate Governance* sangat baik (X₁=1) yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,082. Pada peringkat 2 yaitu penerapan *Islamic Corporate Governance* baik (X₁=2) yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,138. Karena nilai signifikansi yang diperoleh kedua peringkat *Islamic Corporate Governance* adalah lebih dari 0,082 > 0,05, maka dapat

disimpulkan bahwa 95% *Islamic Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud*. Sehingga terima H_{01} , yang berarti *Islamic Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap *fraud*

b. Komite audit

Berdasarkan Tabel 4.6, memperoleh hasil bahwa variabel komite audit (X_2) yang memiliki nilai signifikansi sebesar $0,023 < 0,05$. Sehingga tolak H_{a2} , yang artinya komite audit berpengaruh terhadap *fraud*.

4. Tingkat Kemampuan Model (*Pseudo R-Square/R²*)

Tingkat kemampuan model dengan penilaian *Pseudo R-Square* ini digunakan yang bertujuan untuk melihat seberapa mampukah variabel *Islamic Corporate Governance* dan komite audit dalam menjelaskan variasi keterjadian *fraud*. Dimana nilai *R-Square* yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan model dalam penelitian ini adalah nilai *Nagelkerke*. Dalam penelitian ini, hasil pengujian tingkat kemampuan model atau (*Pseudo R Square/ R²*), ditunjukkan dalam Tabel 4.7

Tabel 4.7

Hasil Pengujian Tingkat Kemampuan Model
(*Pseudo R Square/R²*)

| | |
|----------------------|-------|
| <i>Cox and Snell</i> | 0,264 |
| <i>Nagelkerke</i> | 0,299 |
| <i>McFadden</i> | 0,142 |

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 16, 2022

Berdasarkan Tabel 4.7 memperoleh nilai *Pseudo R-Square* model regresi logistik ordinal yang dapat dilihat dari nilai *Nagelkerke* yaitu

sebesar 0,299. Besaran nilai *Nagelkerke* tersebut menunjukkan bahwa dalam model regresi logistik ordinal ini, variabel independen *Islamic Corporate Governance* dan komite audit mampu menjelaskan variasi keterjadian *fraud* pada Bank Umum Syariah Non Devisa Tahun 2015 – 2020 sebesar 29%, sedangkan 71% sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

5. Estimasi Parameter (*Parameter Estimates*)

Tabel 4.8
Hasil Pengujian Estimasi Parameter (*Parameter Estimates*)

| Variabel | Estimate (β) | Standar error | Wald | Sig | Keterangan |
|-----------------|----------------------|---------------|-------|-------|------------------|
| Threshold (Y=0) | -4,029 | 1,341 | 9,025 | 0,003 | Signifikan |
| Threshold (Y=1) | -2,706 | 1,234 | 4,808 | 0,028 | Signifikan |
| (X1 = 1) | -1,980 | 1,137 | 3,029 | 0,082 | Tidak Signifikan |
| (X1 = 2) | -1,177 | 0,798 | 2,198 | 0,138 | Tidak Signifikan |
| (X1 = 3) | 0 ^a | . | . | . | |
| X2 | -0,056 | 0,24 | 5,171 | 0,023 | Signifikan |

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 16, 2022

Pengujian estimasi parameter atau *parameter estimates* dalam model regresi logistik ordinal yang ditunjukkan dalam Tabel 4.8, menyimpulkan bahwa terdapat 1 variabel independen yang berpengaruh secara signifikan. Variabel independen yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *fraud* tersebut yakni variabel komite audit.

D. Pembahasan

1. Pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2020

Koefisien regresi logistik ordinal yang diperoleh dari variabel *Islamic Corporate Governance* peringkat 1 sangat baik ($X_{1=1}$) yakni sebesar -1,980. Koefisien tersebut bernilai negatif sehingga terjadi hubungan yang tidak searah antara *Islamic Corporate Governance* peringkat 1 sangat baik ($X_{1=1}$) dengan terjadinya kasus *fraud*. Artinya, semakin baik penerapan *Islamic Corporate Governance* maka akan menurunkan terjadinya kasus *fraud*. Pengujian secara parsial menggunakan uji *wald*, dengan memperoleh hasil variabel *Islamic Corporate Governance* peringkat 1 sangat baik ($X_{1=1}$) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,082 > 0,05$, yang artinya *Islamic Corporate Governance* peringkat 1 sangat baik ($X_{1=1}$) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya kasus *fraud*.

Selanjutnya koefisien regresi logistik ordinal yang diperoleh dari variabel *Islamic Corporate Governance* peringkat 2 baik ($X_{1=2}$) yakni sebesar -1,177. Koefisien tersebut bernilai negatif sehingga terjadi hubungan yang tidak searah antara *Islamic Corporate Governance* peringkat 2 baik ($X_{1=2}$) dengan terjadinya kasus *fraud*. Artinya, semakin baik penerapan *Islamic Corporate Governance* maka akan menurunkan terjadinya kasus *fraud*. Pengujian secara parsial menggunakan uji *wald*, dengan memperoleh hasil variabel *Islamic Corporate Governance* peringkat 2 baik ($X_{1=2}$) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,138 > 0,05$, yang artinya peringkat 2 baik ($X_{1=2}$) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya kasus *fraud*.

Berdasarkan pengujian kedua peringkat variabel *Islamic Corporate Governance* tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel *Islamic Corporate Governance* peringkat 1 sangat baik ($X_{1=1}$) dan peringkat 2 baik ($X_{1=2}$), yang mana masing-masing memiliki nilai signifikan sebesar 0,082; 0,138 > 0,05. Maka H_{01} ditolak, sehingga *Islamic Corporate Governance* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kasus *fraud* pada Bank Umum Syariah Non Devisa Tahun 2015-2020.

Hasil penelitian ini, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haifa Najib dan Rini dengan menyimpulkan bahwa *Islamic Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap tindakan *fraud*.⁸ Dan sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan Dinnul Alfian Akbar yang menyimpulkan bahwa *Islamic Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Syariah.⁹

Islamic Corporate Governance merupakan suatu sistem nilai penerapan tata kelola yang berlandaskan prinsip-prinsip islam yang mengatur hubungan antar pihak yang terlibat didalamnya, agar mereka dapat melakukan kewajiban dan haknya secara baik dan benar untuk meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam rangka ibadah kepada Allah.¹⁰ Penerapan pelaksanaan

⁸Haifa Najib dan Rini, "Analisis Faktor yang Mempengaruhi *Fraud* di Bank Syariah," *Simposium Nasional Akuntansi*, Volume 5, Nomor 6, (2016), 12.

⁹Dinnul Alfian Akbar, "Relevansi *Fraud Triangle* pada Bank Syariah," *Simposium Nasional Akuntansi XX*, (2017), 21.

¹⁰Sarah Sakinah Putri, "Penerapan Prinsip *Islamic Corporate Governance* pada BMT Al-Hijrah Kota Bukittinggi," ' *Skripsi* (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2021), 17.

Islamic Corporate Governance juga sangat diperlukan karena dalam membangun kepercayaan masyarakat sebagai syarat yang mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat.¹¹ Semakin tinggi penerapan *Islamic Corporate Governance* dalam menerapkan prinsip syariah, maka ada kemungkinan bank untuk memperoleh kategori sebagai bank yang sehat.¹² Perkembangan tata kelola perusahaan dapat dilihat dari peringkat *Islamic Corporate Governance* di masing-masing Bank Umum Syariah Non Devisa, dimana dengan melihat peringkat tersebut dapat mengurangi kasus kejadian *fraud*. Dalam hal ini, bank syariah perlu melakukan perbaikan secara terus-menerus terkait tata kelola perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan efektif untuk diterapkan pada perbankan syariah yang akan datang.

2. Pengaruh komite audit terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2020

Koefisien regresi logistik ordinal yang diperoleh dari variabel komite audit yakni sebesar -0,056. Koefisien tersebut bernilai negatif sehingga terjadi hubungan yang tidak searah antara komite audit dengan terjadinya kasus *fraud*. Artinya semakin besar komite audit yang berasal dari pihak independen maka akan menurunkan terjadinya kasus *fraud*. Pengujian secara parsial menggunakan uji *wald* dengan memperoleh hasil bahwa

¹¹Fadiyah Hani Sabila, "Karakteristik dan Penerapan *Islamic Corporate Governance* pada Perbankan Syariah," *FUADUNA*, Volume 2, Nomor 2, (2018), 122.

¹²Nurjana, "Pengaruh *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap *Fraud* Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019," *Skripsi* (Jambi: UIN Sultha Thata Saifuddin, 2021), 79.

variabel komite audit memiliki nilai signifikan sebesar $0,023 < 0,05$. Maka H_{a2} diterima, sehingga komite audit secara parsial berpengaruh terhadap kasus *fraud* pada Bank Umum Syariah Non Devisa.

Hasil penelitian ini, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardani, Yesu Mutia Basri dan M. Rasuli dengan menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan.¹³ Komite audit berasal dari pihak independen yang telah dipilih dan diangkat berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki dalam bidang akuntansi, laporan keuangan dan perbankan syariah. Sehingga dengan memiliki ilmu dan pengalaman tersebut, nantinya mampu meningkatkan pengawasan dengan baik.¹⁴ Menurut Rahmawati dan Marsono menyebutkan bahwa komite audit yang jumlah anggotanya lebih banyak, akan memiliki kemampuan dan kinerja yang lebih baik dalam menangani permasalahan di perusahaan. Semakin banyak jumlah komite audit akan meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik dan mencegah kemungkinan terjadinya *fraud*.¹⁵ Dalam hal ini, komite audit pada Bank Umum Syariah Non Devisa tanggungjawabnya dalam

¹³Mardani, Yesi Mutia Basri, dan M. Rasuli, "Pengaruh Komite Audit, Internal Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Kecurangan pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI 2018" *Jurnal Al-Iqtishad*, Volume 1, Nomor 16 (2020), 14.

¹⁴Phuji Maisaroh, "Pengaruh Komite Audit, *Good Corporate Governance* dan *Whistleblowing System* terhadap *Fraud* Bank Umum Syariah Periode 2016-2019," *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo), 140.

¹⁵Febri Masak & Suzy Noviyanti, "Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap *Financial Distres*," *International Journal of Social Science and Business*, Volume 3, Nomor 3 (2019), 239.

menjalankan tugasnya sudah baik harus tetap dipertahankan. Tetaplah berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan baik secara langsung atau tidak langsung dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki dalam bidangnya.

3. Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan komite audit terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2020

Berdasarkan hasil uji keseluruhan model (*overall model fit*) regresi logistik ordinal diperoleh nilai signifikan sebesar 0,011. Nilai signifikansi tersebut adalah kurang dari ($0,011 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95% terdapat minimal satu parameter variabel prediktor yang signifikan dalam model regresi logistik ordinal. Sehingga H_{a3} diterima, artinya model *fit* (model dengan variabel independen lebih baik dari model *intercept* atau *Islamic Corporate Governance* dan komite audit secara simultan berpengaruh terhadap kasus *fraud* pada Bank Umum Syariah Non Devisa.

Hasil uji kemampuan model (*Pseudo R-Square*) menunjukkan nilai *nagelkerke* adalah sebesar 0,299. Artinya, dalam model regresi logistik ordinal ini variabel independen mampu menjelaskan variasi keterjadian *fraud* pada Bank Umum Syariah Non Devisa sebesar 29%. Sedangkan sisanya 71% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

P O N O R O G O

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil pengujian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut

1. *Islamic Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah Non Devisa Tahun 2015-2020. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi *Islamic Corporate Governance* peringkat 1 (sangat baik ($X_{1=1}$)) sebesar $0,082 > 0,05$ dan peringkat 2 (baik ($X_{1=2}$)) sebesar $0,138 > 0,05$, sehingga H_{01} diterima yang artinya *Islamic Corporate Governance* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah Non Devisa Tahun 2015-2020.
2. Komite audit berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah Non Devisa Tahun 2015-2020. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi komite audit sebesar $0,023 < 0,05$, sehingga H_{a2} diterima yang artinya berpengaruh secara signifikan terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah Non Devisa Tahun 2015-2020.
3. *Islamic Corporate Governance* dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2020. Hal tersebut dapat dilihat dari uji keseluruhan model (*overall model fit test*) regresi logistik ordinal nilai signifikansi $0,011 < 0,05$ maka H_{a4} diterima, artinya model *fit* (model dengan variabel independen lebih baik dari model *intercept*). Atau dengan kata lain *Islamic Corporate Governance* dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap *fraud* pada Bank

Umum Syariah Non Devisa Tahun 2015-2020. Hasil uji kemampuan model (*Pseudo R-Square*) menunjukkan nilai *Nagelkerke* adalah sebesar 0,199. Artinya variabel independen mampu menjelaskan variasi keterjadian *fraud* pada Bank Umum Syariah Non Devisa sebesar 29%, sedangkan sisanya 71% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

B. Saran

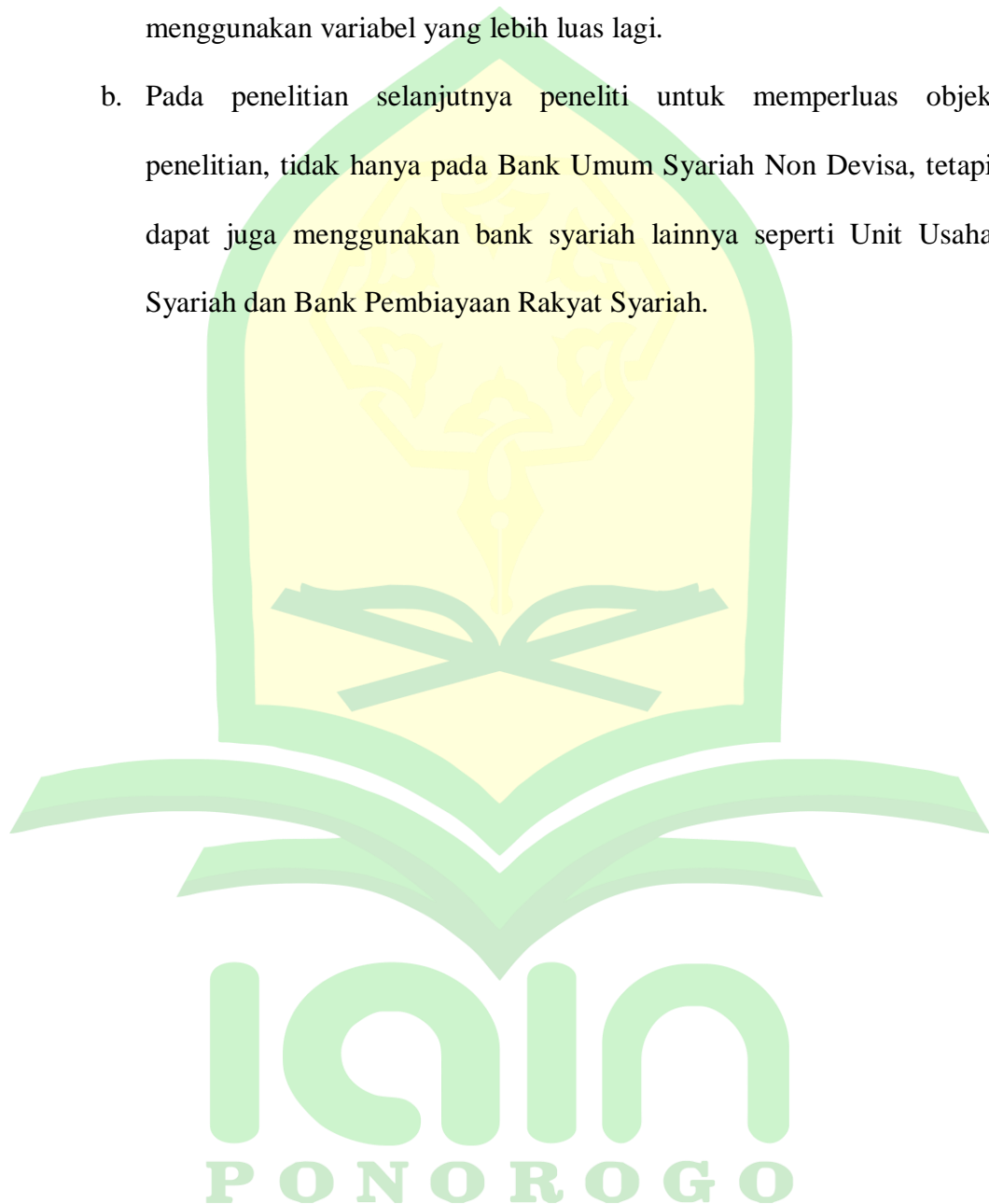
1. Bagi Bank Umum Syariah Non Devisa di Indonesia

Saran yang dapat diberikan bagi Bank Umum Syariah Non Devisa dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Islamic Corporate Governance* merupakan penerapan tata kelola perusahaan yang berbasis islam. Dimana Bank Umum Syariah Non Devisa ini diharapkan harus terus meningkatkan penerapan tata kelola agar dapat mengurangi kejadian *fraud*. Misalnya dengan melengkapi tata kelola sesuai prinsip islam, memberikan hukuman bagi pelaku *fraud* dengan efek jera.
- b. Komite audit yang berkomitmen dalam menjalankan tugasnya diharapkan dapat meningkatkan lingkup kinerjanya. Misalnya memberikan masa tugas yang lebih lama untuk memperkecil kejadian *fraud* Bank Umum Syariah Non Devisa. Komite audit pada Bank Umum Syariah Non Devisa ini tanggungjawabnya sudah baik akan tetapi harus tetap dipertahankan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Untuk penelitian selanjutnya, variabel-variabel yang digunakan peneliti masih terbatas, sehingga penelitian selanjutnya bisa menggunakan variabel yang lebih luas lagi.
- b. Pada penelitian selanjutnya peneliti untuk memperluas objek penelitian, tidak hanya pada Bank Umum Syariah Non Devisa, tetapi dapat juga menggunakan bank syariah lainnya seperti Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Ma'ruf. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Andrianto & M. Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)*. Surabaya: Qiara Media, 2019.
- Arikunto, Suharmi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rnika Cipta. 2013.
- Baroroh, Ali. *Trik-trik Analisis Statistik dengan SPSS15*. Jakarta: PT Elex Media Komputiduno, 2008.
- Dewi, Rozmita YR. *Penyebab dan Pencegahannya*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Djamaris, Aurino R.A. *Pemanfaatan Regresi Logistik Ordinal dan Multinomial Dengan SPSS*. Jakarta: Universitas Bakrei, 2021.
- Fauzi, Ahmad. *Super Auditor Menumpas Korupsi dan Mengungkap Fraud Tidak Biasa*. Riau: Bantam Publisher, 2020.
- Harlan, Johan. *Analisis Regresi Logistik*. Depok: Gunadarma, 2018.
- Hasibuan, Abdul Nasser. Rahmad Annam. and Nofinawati. *Audit Bank Syariah* . Jakarta: Kencana, 2020.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pres, 2014.
- Kadir. *Statistik Penerapan Konsep, Contoh dan analisis Data dengan Program SPSS/Lisrel Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pres. 2015.
- Kurniawan. *Analisis Data Menggunakan Atata SE 14(Panduan Analisis, Langkah Lebih Cepat, Lebih Mudah dan Paling Praktis*. Sleman: Budi Utama, 2019.

- Latan, Henky. *Structural Equation Modeling: Konsep dan Aplikasi Menggunakan Program LISREL 8.80*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Rajawali Pres, 2015.
- Pebruary, Silviana. *Pencegahan Fraud di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta : CV Budi Utama, 2019.
- . *Pencegahan Fraud di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Purba, Rahima Br. & Haryono Umar, *Kualitas Audit & Deteksi Korupsi*. Medan: Merdeka Kreasi, 2021.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahmatika, Dien Novianty. *Fraud Auditing Kajian Teoretis dan Empiris*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Rosyidah, Masayu & Rafiq Fijra, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Sihotang, Kasdin. *Etika Profesi Akuntansi Teori dan Kasus*. Depok: PT. Kanisius, 2019.
- Siyoto, Sandu. & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Leterasi Media Publishing, 2015.
- Rusdiyanto. Susetyorini. dan Umi Elan. *Good Corporate Governance: Teori dan Implementasinya di Indonesia*. Bandung: Refika Adhitama, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta, 2014.

- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2015.
- . *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2019.
- Suryana,. *Motodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Badung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Suryani & Hendryadi. *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta : Prenamedia Grup, 2015.
- Suyanto dkk. *Analisis Data Penelitian: Petunjuk Praktis Bagi Mahasiswa Kesehatan Menggunakan SPSS*. Semarang: Unissula, 2018.
- Syofyan, Efrizal. *Good Corporate Governance (GCG)*. Malang: Unisma Press, 2021.
- Widarjono, Agus. *Analisis Multivariat Terapan Dengan Program SPSS, AMOS, dan SMARTPLS*. Yogyakarta : UPP STIM YKPM, 2015.

Jurnal

- Akbar, Dinnul Alfian. Relevansi *Fraud Triangle* pada Bank Syariah. *Simposium Nasional Akuntansi XX*, (2017).
- Budyandra, Budyandra & Ghaida Nasrai Azzahra. Penerapan Regresi Logistik Ordinal *Proportional Odds Model* pada Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Imunisasi Dasar Anak Balita di Provinsi Aceh Tahun 2015. *Media Statistika*. Vol. 10, No. 1 (2017).

- Halim, Abdul. Karakteristik Pemegang Amanah dalam Al-Qur'an. *Jurnal Studi al-Qur'an dan Hadis*. Vol. 11, No. 2, (2019).
- Handoko, Bambang Leo. & Kinanti Ashari Ramadhan. Pengaruh Komite Audit, Keahlian Keuangan dan Ukuran Perusahaan terhadap Kemungkinan Kecurangan Laporan Keuangan. *DeReMa Jurnal Manajemen*. Vol. 12, No. 1 (2018).
- Hartati, Nani. Analisis Komporasi Kinerja Keuangan; Bank Devisa dan Bank Non Devisa. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Vo. 6. No. 2 (2017).
- Herdianto, Geri Herdianto. Analisis Faktor yang mempengaruhi *Fraud* di Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*. Vol. 10, No. 1, (2016).
- Karina, Chindy. Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah MEA*. Vol. 4, No. 3 (2020).
- Lidia & Bonifasius H. Tambunan. Peran Komite Audit dalam *Good Corporate Governance*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 21, No. 1 (2021).
- Mardani, Yesi Mutia Basri, dan M. Rasuli. Pengaruh Komite Audit, Internal Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Kecurangan pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI 2018. *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol.1 No. 16 (2020).
- Masak, Febri. & Suzy Noviyanti. Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap *Financial Distres*. *International Journal of Social Science and Business*. Vol. 3, No. 3 (2019).
- Muhammad, Rifqi. Ratna Kusumadewi & Samsubar Saleh. Analisis Pengaruh Syari'ah *Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap Tindakan *Fraud* (Studi Empirik pada BUS di Indonesia periode 2013-2017). *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*. Vol. 6, No. 1, (2019).

- Najib, Haifa. dan Rini. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Fraud* di Bank Syariah. *Simposium Nasional Akuntansi*. Vol. 5, No. 6 (2016).
- Nurliasari, Khairani Erlie. & Tarmizi Achamad. Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol. 9, No, 1 (2020).
- Nusron, Lulu Amalia. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Fraud* di Bank Syariah. *Tesis*. Vol. 10, No. 1, (2017).
- Ridha, Mifthahul. dan Umiyati. *Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance* dan *Non Performing Financing* terhadap pengungkapan *Fraud* Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Governance*. Vol. 3, No. 1 (2022).
- Sabila, Salma & Puspita, Analisis Pengaruh *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Jumlah *Fraud* Bank Umum Syariah Periode 2015-2019. *Paradigma*. Vo. 19, No. 1 (2022).
- Sabila, Fadiyah Hani. Karakteristik dan Penerapan *Islamic Corporate Governance* pada Perbankan Syariah. *FUADUNA*. Vol. 2, No. 2 (2018).
- Shanti, Yunita Kurnia. Pengaruh Komite Audit terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan Dewan Komisaris sebagai variabel *Intervening*. *Iqtishaduna*. Vol. 9 No. 2 (2020)
- Sula, Atik Emilia. & Moh Nizarul Alim, Pengawasan, Strategi Anti *Fraud*, dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya *Fraud Preventive* Pada Lembaga Keuangan Syariah. *JAFFA* Volume 2, Nomor 2, (2014).
- Sudarmanto, Eko. Manajemen Resiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan *Fraud*. *Jurnal Ilmu Manajemen*. Volume 9, Nomor 2, (2020).

Skripsi

- Aldilarachma, Nurlia. Analisis Rasio Keuangan Perusahaan yang melakukan Merger dan Akuisis dengan Metode Logistik. *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008).
- Budiman, Monika. Pengaruh pengendalian internal, audit internal, *risk based* audit, komite audit dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) serta implikasinya pada kualitas laporan keuangan. *Tesis* (Jakarta: STIE Jakarta, 2019).
- Diani, Yosephine Endah Nur. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengungkapan Keberadaan *Risk Managemen Committee* pada *High Profile*. *Skripsi* (Semarang: UI Semarang, 2013).
- Desriana. Pengaruh *Profit Sharing Ratio Zakat performance ratio, islamic income ratio* dan *Firm Size* terhadap *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Perode 2012-2017. *skripsi* (Palembang: UIN Raden Fatah, 2019).
- Najib, Haifa. Pengaruh *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap *Fraud* Pada Bank Syariah. *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016)
- Nurjanah. Pengaruh *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019. *Skripsi* (Jambi: Sulthan Thaha Saifuddin, 2021).
- Maisaroh, Phuji. Pengaruh Komite Audit, *good corporate governance* dan *whistleblowing system* terhadap *Fraud* Bank Umum Syariah Periode 2016-2019. *Skripsi* (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2021).
- Mawarda, Layyina. Pengaruh Pengungkapan *Shariah Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2021).

Putri, Sarah Sakinah Penerapan Prinsip. *Islamic Corporate Governance* pada BMT Al-Hijrah Kota Bukittinggi. *Skripsi* (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2021).

Riska, Sonia Ayesa. Analisis Implementasi *Islamic Corporate Governance* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Banda Aceh. *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020).

Wahyuningsih, Enzelita. *Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance* terhadap *Fraud* Bank Umum Syariah. *Skripsi* (Jakarta: UIN Jakarta, 2021).

Website

Bank BRI Syariah. "Annual Report." Jakarta Pusat, dalam www.bankbrisyariah.co.id.

Bank BCA Syariah. "Annual Report," Jakarta, dalam www.bankbcasyariah.co.id.

Bank Syariah Bukopin. "Annual Report." Jakarta dalam www.syariahbukopin.co.id.

Bank Panian Syariah. "Annual Report." Jakarta dalam www.paninbanksyariah.co.id.

Bank Victoria Syariah. "Annual Report." Jakarta Barat dalam www.bankvictoriasyariah.co.id.

Bank BJB Syariah. "Annual Report." Bandung dalam www.bjbsyariah.co.id.

Bank Indonesia. "Surat Edaran Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang *Fraud*."

POJK, Indonesia. “Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.” (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015)

POJK, Indonesia. “Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Startegi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum.” (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019)

POJK, Indonesia. “Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.” (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015)

